

# PERSEPSI DAN KEPATUHAN PUBLIK MEMBAYAR PAJAK

---

**Temuan Survei:**  
9-12 JULI 2022

The logo for INDIKATOR features the word "INDIKATOR" in a bold, black, sans-serif font. The letter "O" is stylized as a circle with a teal center and a red arrow pointing towards the top right. Above the logo is a thick red horizontal bar with a diagonal cut on the right side.

Jl. Cisadane No. 8, Menteng – Jakarta Pusat

Telp: (021) 31927996/98, Fax: (021) 3143867

Website: [www.indikator.co.id](http://www.indikator.co.id)

A thick red horizontal bar with a diagonal cut on the right side, matching the one above the logo.

# PENGANTAR

- Reformasi perpajakan di Indonesia terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi di masyarakat. Sejak 1983, kemudian berlanjut di era reformasi hingga 2016. Saat ini, Reformasi Perpajakan merupakan kelanjutan dari Reformasi Perpajakan 2016 dengan dibentuknya Tim Reformasi Perpajakan melalui Keputusan Menteri Keuangan No. KMK-885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan (Tim Reformasi). Pembentukan tim ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap institusi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, kehandalan pengelolaan basis data/administrasi perpajakan, dan integritas serta produktivitas aparat perpajakan.
- Berbagai program telah dicanangkan oleh Tim Reformasi tersebut dalam rangka mencapai tujuan. Yang terbaru dan banyak disosialisasikan untuk masyarakat umum di antaranya adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tax Amnesty atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP.
- Keberhasilan program-program tersebut akan dapat meningkatkan penerimaan negara dari pajak, yang akan digunakan untuk pembangunan. Oleh karena itu, pengetahuan dan kepatuhan warga dalam berpartisipasi dalam program Reformasi Perpajakan tersebut menjadi krusial untuk mendukung keberhasilan program.

# PENGANTAR

- Sekitar enam tahun berselang sejak pembentukan Tim Reformasi. Bagaimana persepsi publik terhadap pajak dan sejauh mana kepatuhan mereka membayar pajak menjadi penting untuk diketahui. Untuk tujuan tersebut, Indikator Politik Indonesia menyelenggarakan survei opini publik. Survei menggali pandangan publik tentang pajak secara umum dan manfaat pajak. Survei juga menanyakan tentang pengetahuan publik tentang beberapa program Direktorat Jendral Pajak (DJP), antara lain NPWP, PPS, dan NIK sebagai NPWP. Secara khusus, analisis survei juga membedakan antara publik secara umum dengan mereka yang berpendapatan di atas Rp 4 juta per bulan sebagai kelompok yang menjadi wajib pajak. Apakah terdapat perbedaan kelompok tersebut dengan publik secara umum dalam pengetahuan, sikap, dan tingkah laku terkait perpajakan. Survei juga melakukan perbandingan berdasarkan sosio-demografi.
- Hasil survei diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan di sektor perpajakan, serta akademisi dan pemerhati perpajakan.

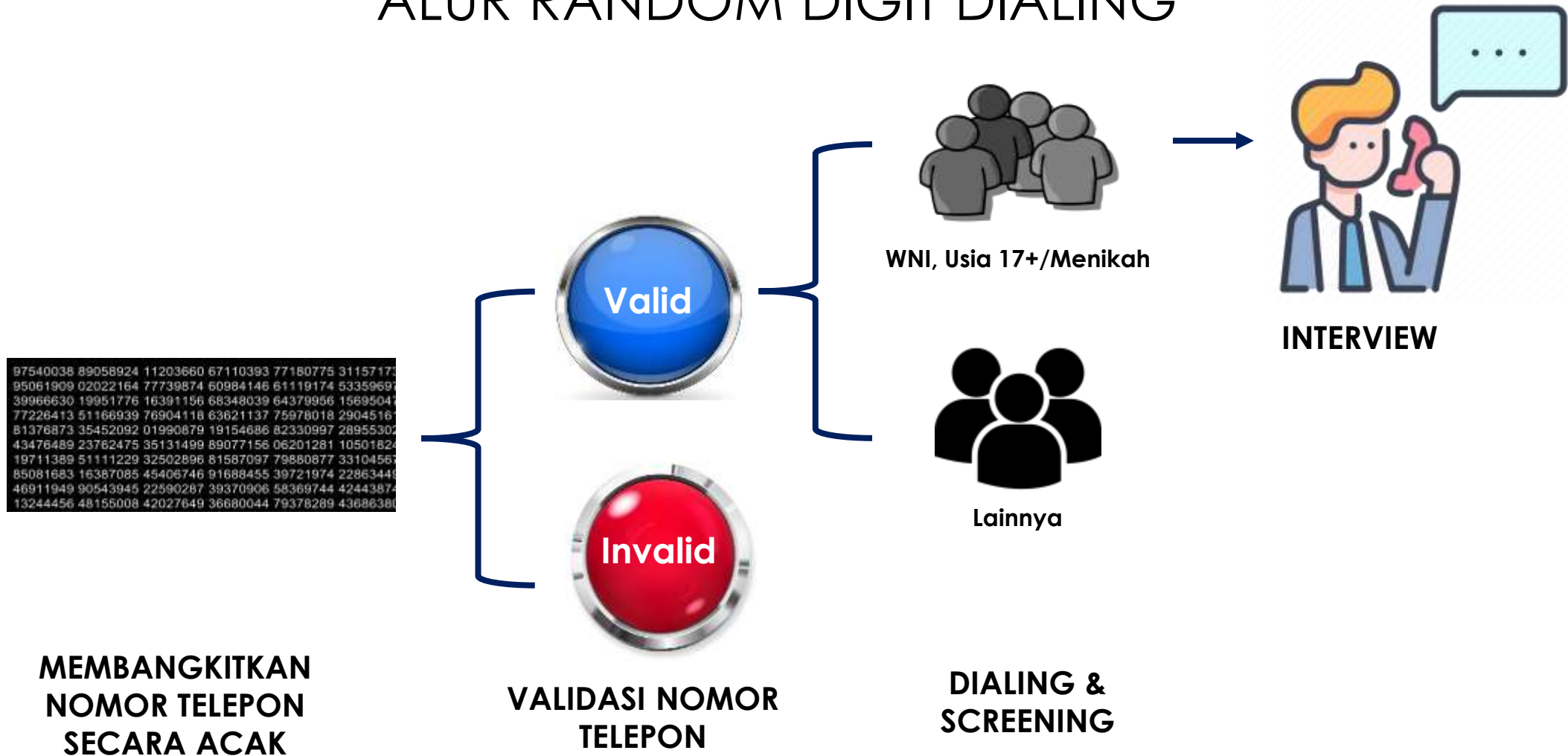
# METODE

---

# METODE

- Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, sulit kita mengetahui secara cepat dinamika persepsi publik atas isu-isu mutakhir dengan mengandalkan survei tatap muka langsung dengan responden.
- Oleh karena itu, survei menggunakan kontak telepon kepada responden adalah cara yang paling mungkin dilakukan.
- Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 83% dari total populasi nasional.
- Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.
- Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1246 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan  $\pm 2.8\%$  pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.
- Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih.

# ALUR RANDOM DIGIT DIALING



KET: RDD difokuskan pada nomor HP (selular), bukan nomor telepon rumah (fixed line). Ini didasarkan atas temuan penelitian sebelumnya bahwa warga dewasa yang mempunyai telepon rumah secara nasional hanya sekitar 3.4%, dan hampir semua dari pemilik telepon rumah tersebut memiliki HP.

## RESPONSE RATE

Total nomor telepon yang dikontak (dialed)	Total pemilik telepon yang mengaku WNI usia 17+/ menikah	Jumlah Responden yang berhasil diwawancarai
11620	1420	1246

# TEMUAN: VALIDASI SAMPEL

---



# PROFIL DEMOGRAFI: SAMPEL VS POPULASI

KATEGORI	SAMPLE ASLI	SAMPLE DIBOBOT	POPULASI
<b>GENDER</b>			
Laki-laki	54.7	51.1	50.0
Perempuan	45.3	48.9	50.0
<b>DESA-KOTA</b>			
Pedesaan	36.4	49.7	50.2
Perkotaan	63.6	50.3	49.8
<b>USIA</b>			
<= 20 tahun	9.1	10.7	10.3
21-25 tahun	32.5	13.1	12.5
26-30 tahun	22.2	13.8	13.5
31-35 tahun	12.3	11.8	12.0
36-40 tahun	8.3	12.2	11.6
41-45 tahun	6.0	8.9	9.8
46-50 tahun	5.1	8.6	8.6
51-55 tahun	2.2	7.3	6.6
56-60 tahun	1.2	4.9	5.1
> 60 tahun	1.0	8.6	10.1

KATEGORI	SAMPLE ASLI	SAMPLE DIBOBOT	POPULASI
<b>AGAMA</b>			
Islam	88.6	85.8	87.2
Protestan/Katolik	8.9	10.8	9.9
Lainnya	2.5	3.4	3.0
<b>ETNIS</b>			
Jawa	38.4	42.5	40.2
Sunda	18.8	14.5	15.5
Batak	4.3	3.1	3.6
Madura	2.2	3.3	3.0
Betawi	2.7	2.6	2.9
Minang	3.4	2.4	2.7
Bugis	5.2	2.5	2.7
Melayu	11.2	2.1	2.3
Lainnya	13.9	26.9	27.1
<b>PENDIDIKAN</b>			
<= SD	7.2	35.8	37.0
SLTP	10.0	18.3	18.0
SLTA	53.5	31.2	31.2
Kuliah	29.0	14.2	13.7
TT/TJ	0.3	0.5	-

# PROFIL DEMOGRAFI: SAMPEL VS POPULASI

KATEGORI	SAMPLE ASLI	SAMPLE DIBOBOT	POPULASI
<b>PROVINSI</b>			
ACEH	2.1	1.6	1.8
SUMATERA UTARA	5.4	5.3	5.1
SUMATERA BARAT	2.2	1.7	1.9
RIAU	2.2	2.7	2.0
JAMBI	1.6	1.0	1.3
SUMATERA SELATAN	3.1	3.5	3.1
BENGKULU	1.2	0.5	0.7
LAMPUNG	3.4	3.1	3.2
KEPULAUAN BANGKA	0.9	0.4	0.5
KEPULAUAN RIAU	0.9	0.5	0.6
DKI JAKARTA	4.7	4.4	4.1
JAWA BARAT	20.1	17.2	17.4
JAWA TENGAH	14.2	14.1	14.6
DI YOGYAKARTA	1.7	1.9	1.4
JAWA TIMUR	13.6	16.6	16.2
BANTEN	4.2	4.3	4.3
BALI	1.7	1.7	1.6

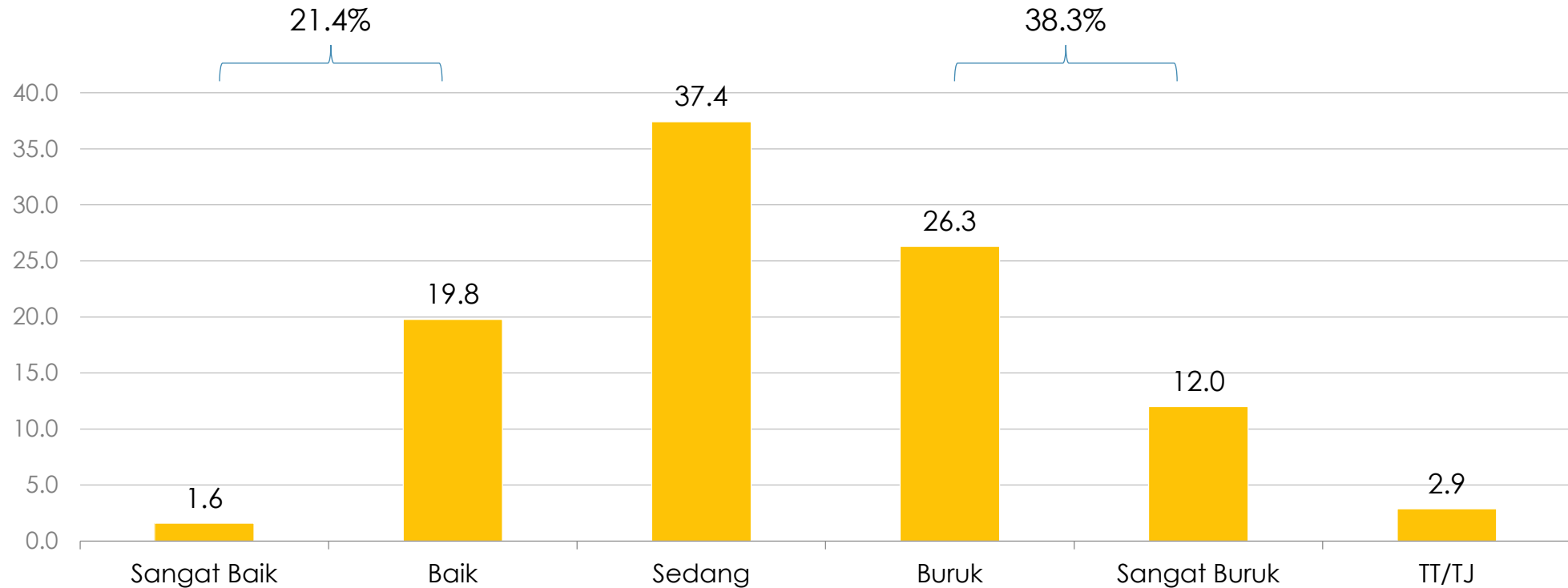
KATEGORI	SAMPLE ASLI	SAMPLE DIBOBOT	POPULASI
<b>PROVINSI</b>			
NUSA TENGGARA BARAT	1.1	1.7	1.9
NUSA TENGGARA TIMUR	1.4	1.6	1.8
KALIMANTAN BARAT	1.8	2.0	1.9
KALIMANTAN TENGAH	0.6	0.8	0.9
KALIMANTAN SELATAN	1.6	1.4	1.5
KALIMANTAN TIMUR	1.4	1.3	1.3
KALIMANTAN UTARA	0.5	0.2	0.2
SULAWESI UTARA	1.0	1.2	1.0
SULAWESI TENGAH	0.9	1.1	1.0
SULAWESI SELATAN	2.4	3.2	3.2
SULAWESI TENGGARA	1.0	0.8	0.9
GORONTALO	0.6	0.5	0.4
SULAWESI BARAT	0.5	0.4	0.5
MALUKU	0.6	0.6	0.7
MALUKU UTARA	0.6	0.3	0.4
PAPUA BARAT	0.3	0.4	0.4
PAPUA	0.6	1.9	1.9

# EVALUASI TERHADAP KONDISI EKONOMI NASIONAL DAN PELAKSANAAN DEMOKRASI

---

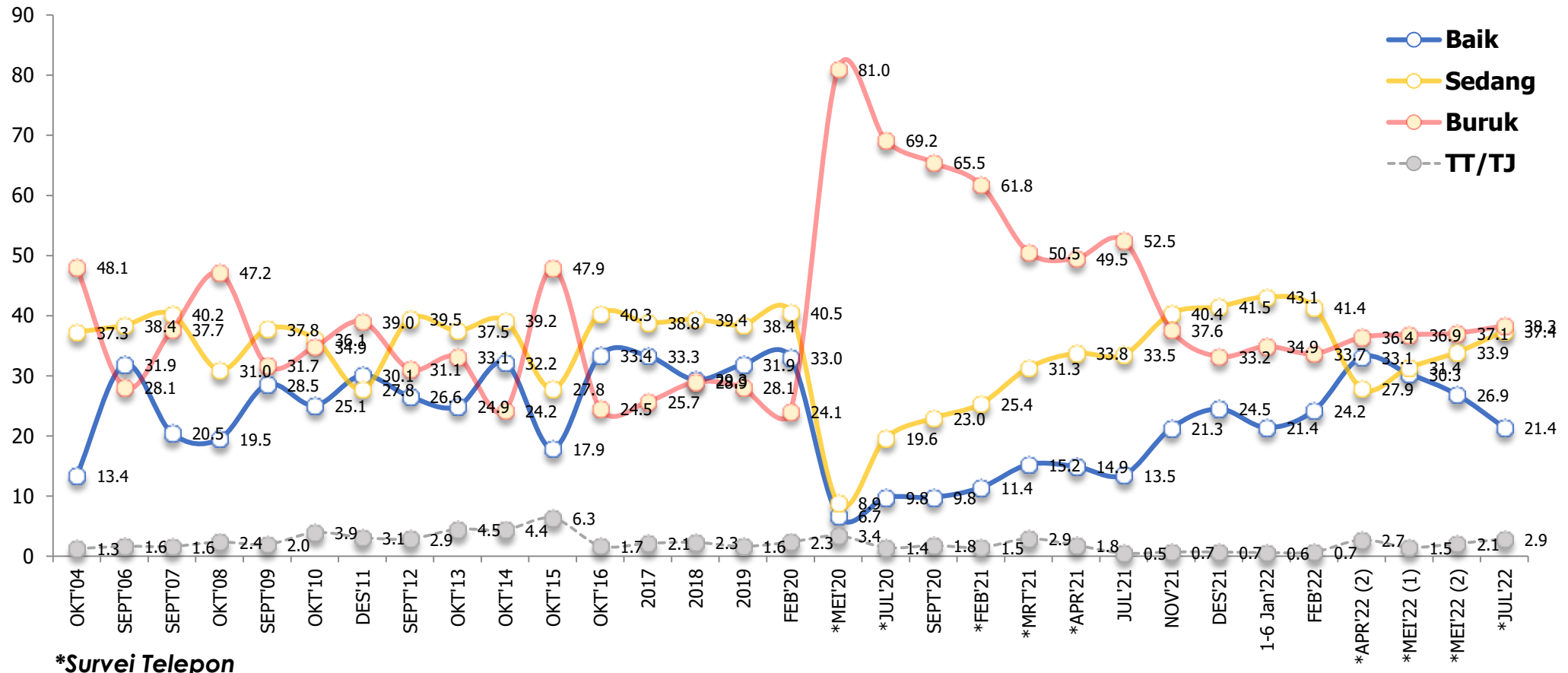
# KEADAAN EKONOMI NASIONAL

Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan ekonomi nasional pada umumnya sekarang? sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk?... (%)



Lebih banyak yang menilai kondisi ekonomi nasional pada umumnya sekarang buruk/sangat buruk.

# TREN KONDISI EKONOMI NASIONAL



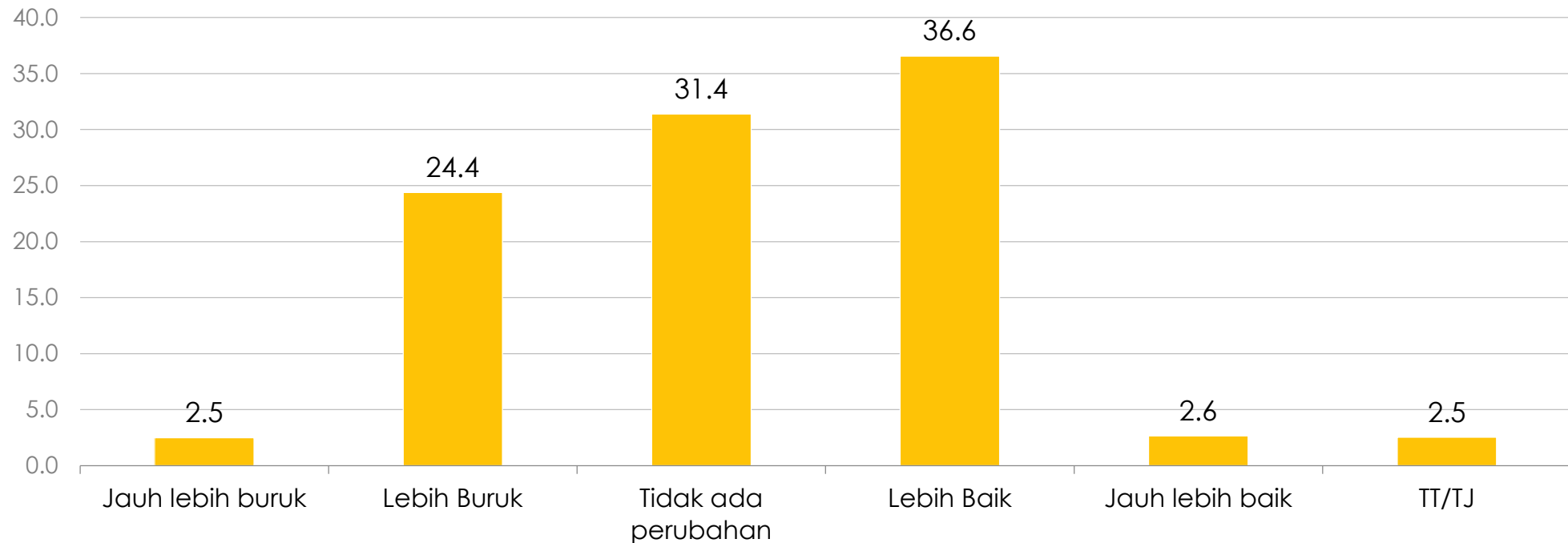
\*Survei Telepon

Lebih banyak yang menilai kondisi ekonomi nasional pada umumnya sekarang buruk/sangat buruk. Penilaian baik cenderung turun terutama dalam dua bulan terakhir.



# KONDISI EKONOMI SAAT INI DIBANDING TAHUN LALU

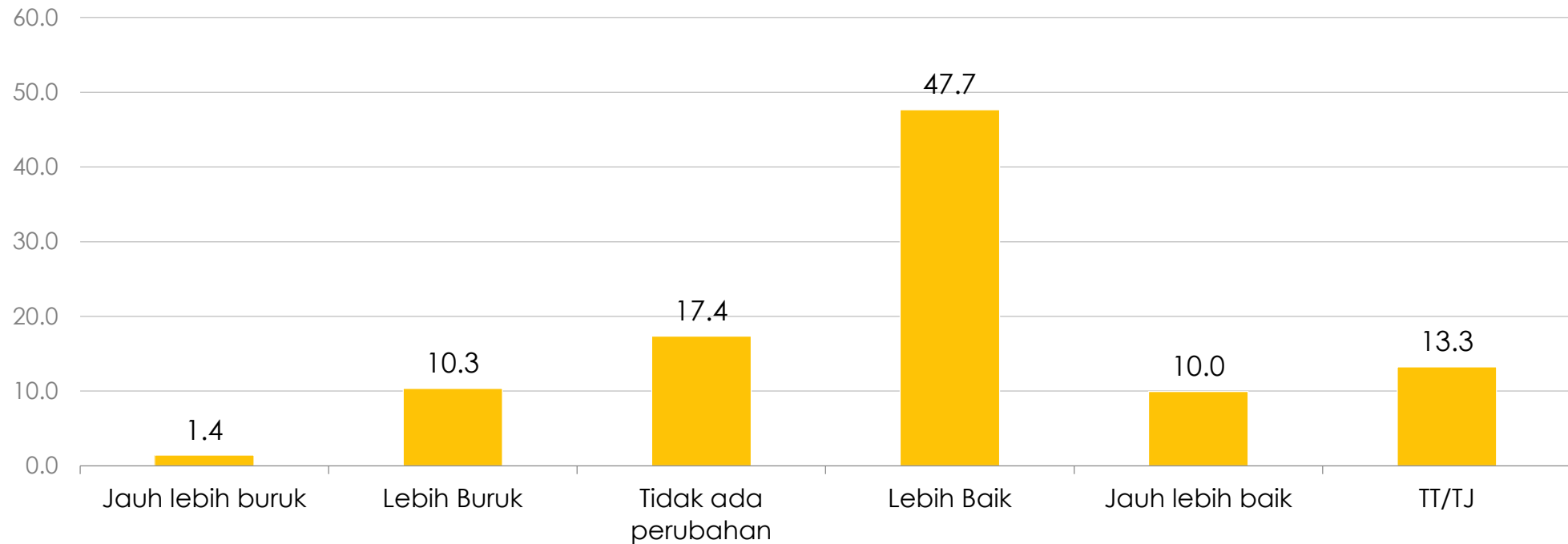
Apakah Ibu/Bapak melihat keadaan ekonomi NASIONAL pada umumnya SEKARANG INI menjadi jauh lebih buruk, lebih buruk, tidak ada perubahan, lebih baik, atau jauh lebih baik dibanding TAHUN LALU?... (%)



Kebanyakan ekonomi nasional dinilai lebih baik/jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Namun, cukup banyak yang menilai tidak ada perubahan, dan cukup banyak yang menilai buruk.

# KONDISI EKONOMI SETAHUN KE DEPAN

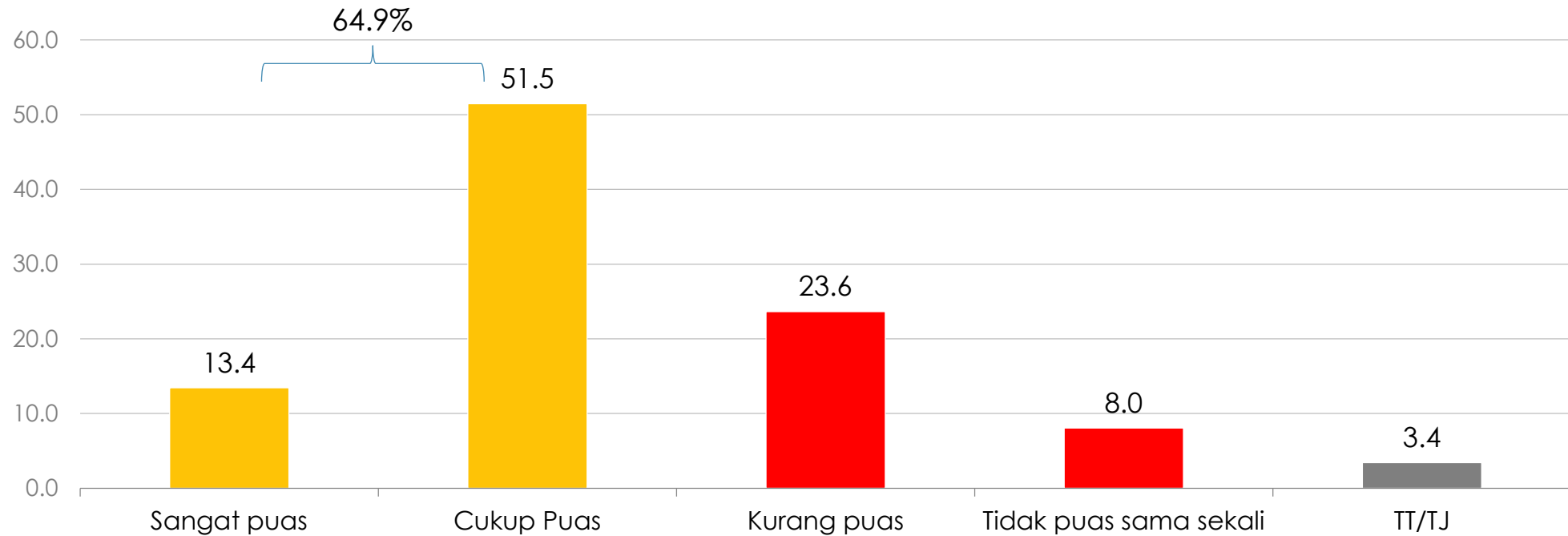
Apakah Ibu/Bapak melihat keadaan ekonomi NASIONAL SETAHUN KE DEPAN pada umumnya menjadi jauh lebih buruk, lebih buruk, tidak ada perubahan, lebih baik, atau jauh lebih baik dibanding SEKARANG INI?... (%)



Mayoritas menilai ekonomi nasional akan lebih baik/jauh lebih baik setahun ke depan.

# KINERJA PRESIDEN

Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi)?... (%)



Mayoritas, 64.9%, merasa cukup/sangat puas dengan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).



# KINERJA PRESIDEN MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH

	BASE	Sangat+Cukup Puas	Kurang+Tidak puas sama sekali	TT/TJ
<b>GENDER</b>				
Laki-laki	51.1	67.0	30.1	2.8
Perempuan	48.9	62.7	33.3	4.0
<b>USIA</b>				
<= 21 tahun	12.6	75.3	24.3	0.4
22 - 25 tahun	11.2	67.5	32.2	0.4
26 - 40 tahun	37.9	58.7	34.4	6.9
41 - 55 tahun	24.8	67.2	30.0	2.8
> 55 tahun	13.5	66.3	33.7	0.0
<b>ETNIS</b>				
Jawa	42.5	68.8	27.4	3.8
Sunda	14.5	53.2	37.0	9.8
Batak	3.1	66.1	32.1	1.8
Madura	3.3	37.5	61.7	0.8
Betawi	2.6	52.9	47.1	0.0
Minang	2.4	47.6	52.4	0.0
Bugis	2.5	46.1	41.6	12.4
Melayu	2.1	47.5	52.5	0.0
Lainnya	26.9	74.1	25.9	0.0
<b>AGAMA</b>				
Islam	85.8	62.7	33.3	4.0
Protestan/Katolik	10.8	75.5	24.5	0.0
Lainnya	3.4	86.5	13.5	0.0

	BASE	Sangat+Cukup Puas	Kurang+Tidak puas sama sekali	TT/TJ
<b>PENDIDIKAN</b>				
<= SD	35.8	64.1	28.7	7.2
SLTP	18.3	68.0	29.6	2.4
SLTA	31.2	60.7	38.1	1.2
Kuliah	14.2	72.7	27.1	0.2
Tidak Menjawab	0.5	51.6	48.4	0.0
<b>PEKERJAAN</b>				
Petani/peternak/nelayan	16.0	56.1	37.0	6.9
Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	34.1	68.9	29.5	1.7
Wiraswasta, pengusaha	7.6	72.4	17.3	10.3
Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	10.3	67.3	32.7	0.0
Ibu Rumah Tangga	19.7	56.8	38.7	4.5
Masih sekolah/kuliah	7.5	70.7	28.5	0.7
Lainnya	5.0	79.4	20.6	0.0
<b>PENDAPATAN</b>				
< 1 juta	23.2	64.6	30.9	4.5
1 - < 2 juta	32.7	57.7	35.4	6.9
2 - < 4 juta	25.1	65.3	34.6	0.1
=> 4 juta	19.0	77.2	22.3	0.5

Kinerja presiden umumnya masih dinilai positif oleh mayoritas warga di berbagai kelompok demografi, kecuali di kelompok etnis Minang, Bugis, dan Melayu.

# KINERJA PRESIDEN MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH

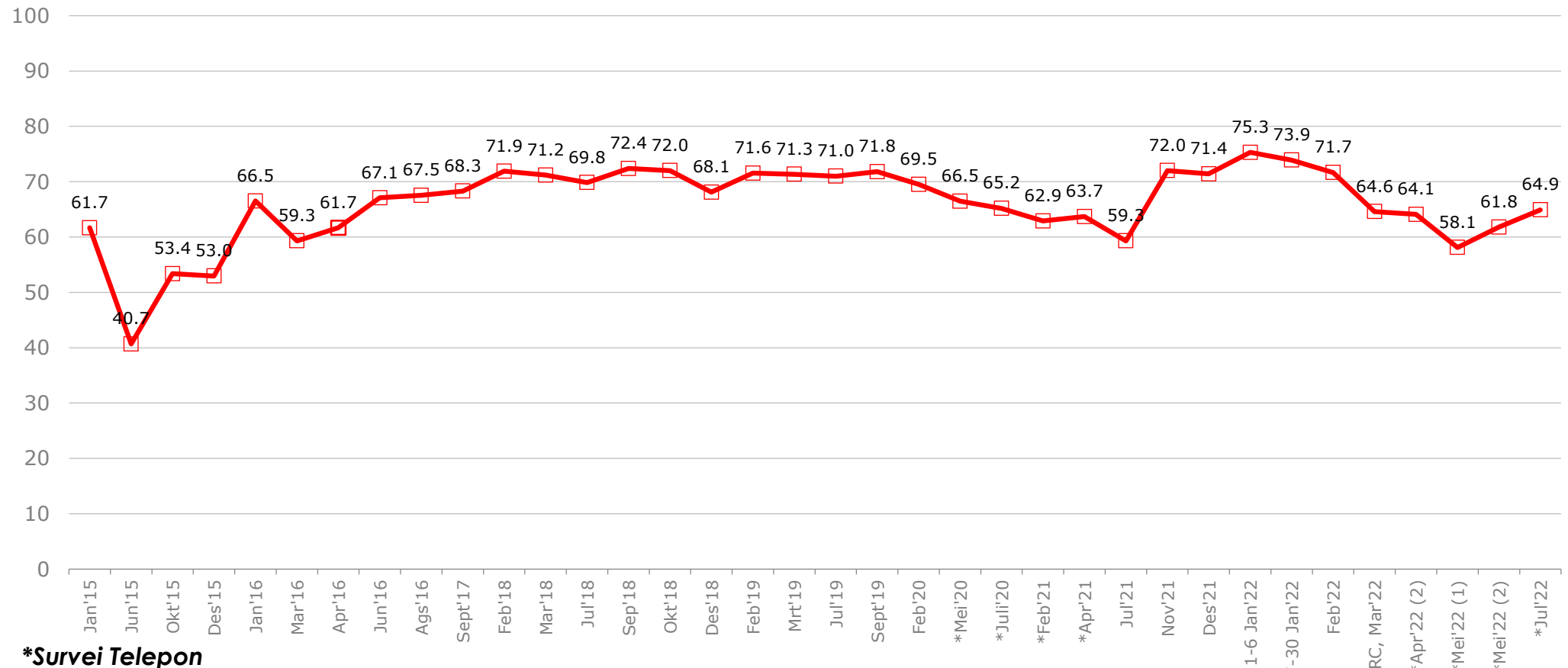
	BASE	Sangat+Cukup Puas	Kurang+Tidak puas sama sekali	TT/TJ
<b>DESA/KOTA</b>				
Pedesaan	<b>49.7</b>	65.0	30.3	4.7
Perkotaan	<b>50.3</b>	64.8	33.1	2.1
<b>WILAYAH</b>				
SUMATERA	<b>20.6</b>	73.9	22.0	4.1
BANTEN	<b>4.3</b>	58.1	28.6	13.3
DKI	<b>4.4</b>	75.8	24.2	0.0
JABAR	<b>17.2</b>	64.5	34.4	1.1
JATENG DIY	<b>15.9</b>	63.6	36.4	0.0
JATIM	<b>16.6</b>	51.4	39.8	8.8
BALI NUSA	<b>4.9</b>	64.6	35.4	0.0
KALIMANTAN	<b>5.7</b>	66.8	32.7	0.5
SULAWESI	<b>7.3</b>	66.4	29.4	4.2
MALUKU PAPUA	<b>3.1</b>	73.7	26.3	0.0

	BASE	Sangat+Cukup Puas	Kurang+Tidak puas sama sekali	TT/TJ
<b>*PILPRES 2019</b>				
Joko Widodo (Jokowi) dan KH. Maruf Amin	<b>55.5</b>	71.7	27.3	1.0
Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno	<b>44.5</b>	41.5	58.1	0.4
<b>*PILEG DPR RI 2019</b>				
PDIP	<b>19.3</b>	72.3	27.7	0.0
GERINDRA	<b>12.6</b>	47.0	52.1	0.9
GOLKAR	<b>12.3</b>	59.0	39.8	1.2
PKB	<b>9.7</b>	59.1	40.9	0.0
NASDEM	<b>9.0</b>	39.6	60.4	0.0
PKS	<b>8.2</b>	49.3	50.7	0.0
DEMOKRAT	<b>7.8</b>	52.1	47.9	0.0
PAN	<b>6.8</b>	41.4	58.6	0.0
PPP	<b>4.5</b>	47.8	52.2	0.0
LAINNYA	<b>9.7</b>	51.1	48.9	0.0

*\*Dibobot dengan hasil KPU 2019*

Mayoritas juga merasa puas dengan kinerja presiden, baik di pedesaan maupun perkotaan juga di semua wilayah. Kepuasan pada presiden jauh lebih tinggi di kelompok basis pemilih Jokowi di Pilpres 2019 dan basis pemilih PDIP, Golkar, PKB, dan Demokrat di Pileg 2019.

# TREN KEPUASAN TERHADAP KINERJA PRESIDEN



\*Survei Telepon

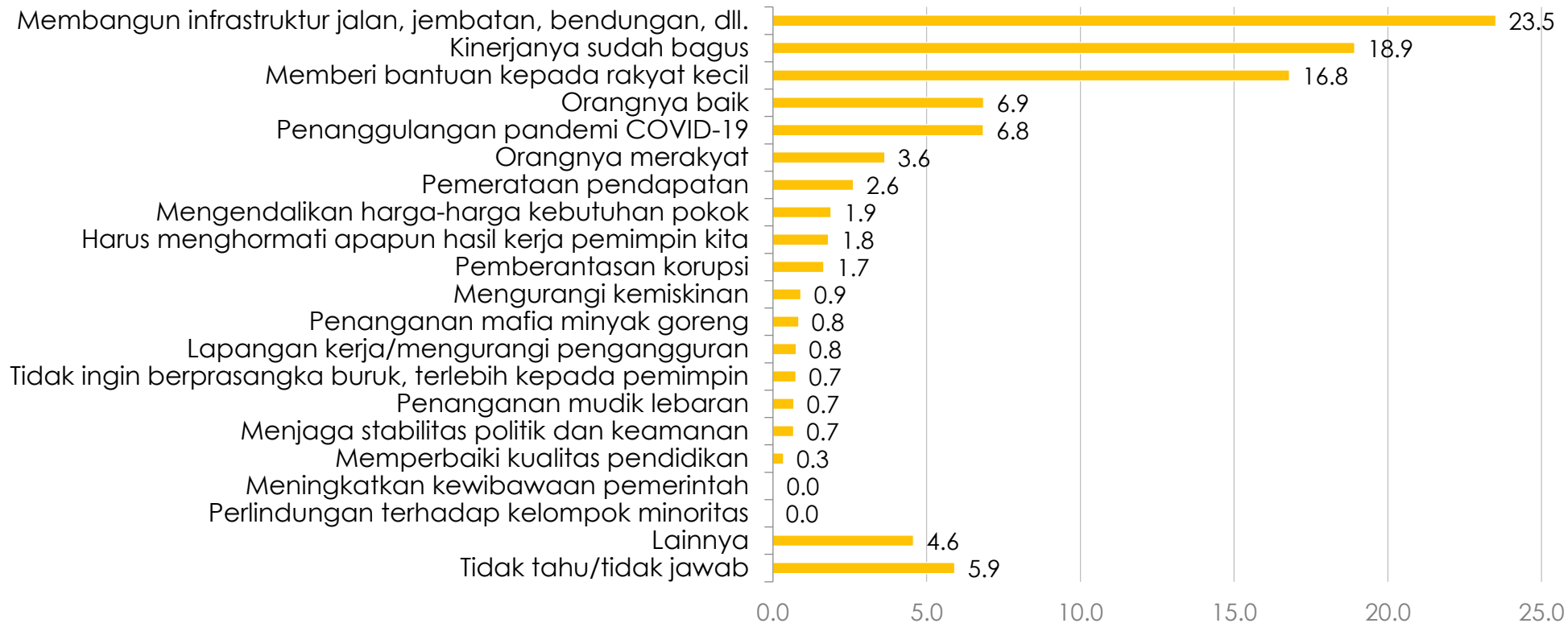
Sumber: LSI, Indikator, SMRC

Keputusan cenderung kembali naik dalam sebulan terakhir setelah sebelumnya cenderung turun.



# ALASAN PALING UTAMA PUAS PADA KINERJA PRESIDEN

Apa alasan PALING UTAMA Ibu/Bapak **merasa sangat atau cukup puas** dengan kinerja Presiden Joko Widodo?... (%)  
(Base: Puas pada kinerja presiden)



Pembangunan infrastruktur, kinerja yang bagus, dan memberi bantuan rakyat kecil adalah alasan yang paling banyak dikemukakan mereka yang puas pada kinerja presiden.

# ALASAN PALING UTAMA TIDAK PUAS PADA KINERJA PRESIDEN

Apa alasan PALING UTAMA Ibu/Bapak **merasa kurang atau tidak puas sama sekali** dengan kinerja Presiden Joko Widodo?... (%)  
(Base: Tidak puas pada kinerja presiden)



Harga kebutuhan pokok meningkat dan lapangan kerja/pengangguran adalah alasan terbanyak mereka yang tidak puas dengan kinerja presiden.



# TEMUAN

- Lebih banyak yang menilai kondisi ekonomi nasional pada umumnya sekarang buruk/sangat buruk. Penilaian baik cenderung turun terutama dalam dua bulan terakhir.
- Kebanyakan ekonomi nasional dinilai lebih baik/jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Mayoritas menilai ekonomi nasional akan lebih baik/jauh lebih baik setahun ke depan.
- Mayoritas, 64.9%, merasa cukup/sangat puas dengan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasan puas lebih banyak karena Pembangunan infrastruktur, kinerja yang bagus, dan memberi bantuan rakyat kecil. Sedangkan alasan tidak puas terutama karena harga kebutuhan pokok meningkat dan lapangan kerja/pengangguran
- Kinerja presiden umumnya masih dinilai positif oleh mayoritas warga di berbagai kelompok demografi, kecuali di kelompok etnis Minang, Bugis, dan Melayu.
- Mayoritas juga merasa puas dengan kinerja presiden, baik di pedesaan maupun perkotaan juga di semua wilayah. Kepuasan pada presiden jauh lebih tinggi di kelompok basis pemilih Jokowi di Pilpres 2019 dan basis pemilih PDIP, Golkar, PKB, dan Demokrat di Pileg 2019.

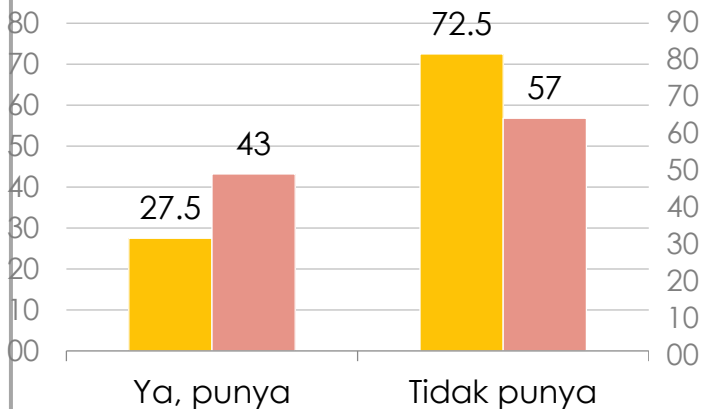
# PERPAJAKAN

---

# KEPEMILIKAN NPWP, PERILAKU PENYAMPAIAN SPT, DAN PEMBAYARAN PAJAK

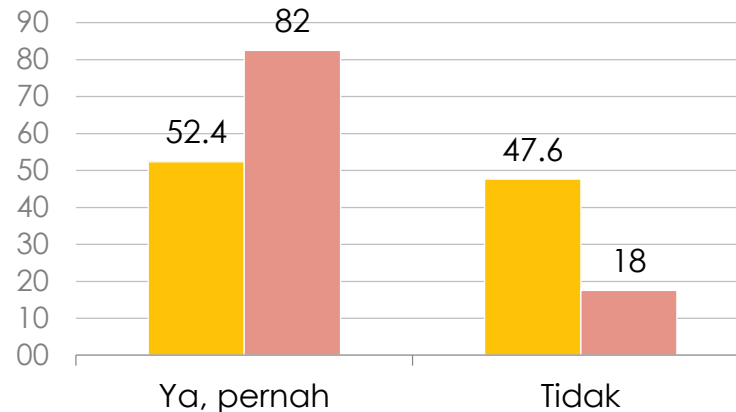
Apakah Ibu/Bapak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?... (%)

■ Semua Responden  
■ Berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan



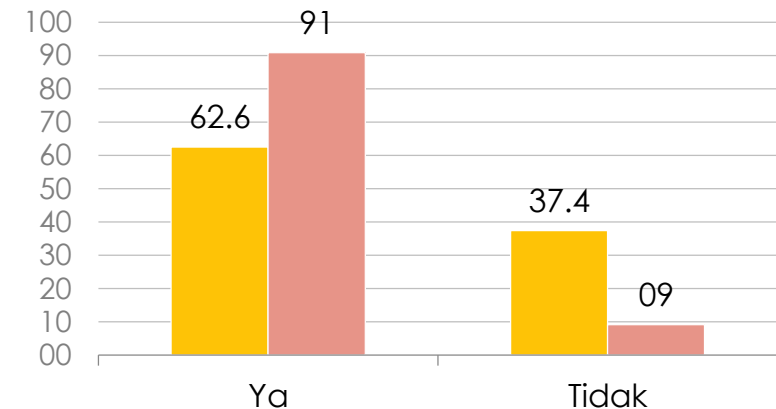
Apakah Ibu/Bapak pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan SPT Tahunan PPh)?... (%)  
**(Base: Memiliki NPWP)**

■ Memiliki NPWP  
■ Memiliki NPWP & Berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan



Apakah Ibu/Bapak membayar Pajak Penghasilan (PPh) (baik orang pribadi ataupun badan), baik secara langsung atau melalui perusahaan tempat Ibu/Bapak bekerja?... (%)  
**(Base: Memiliki NPWP)**

■ Memiliki NPWP  
■ Memiliki NPWP & Berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan



Secara umum sekitar 27.5% memiliki NPWP, dari yang memiliki NPWP sekitar 52.4% pernah menyampaikan SPT pajak dan 62.6% mengaku membayar PPh baik secara langsung atau melalui perusahaan tempat bekerjanya.

Di kelompok yang berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan, kepemilikan NPWP jauh lebih banyak, 43%. Begitu juga yang menyampaikan SPT pajak, dan yang membayar pajak.





# KEPEMILIKAN NPWP, PERILAKU PENYAMPAIAN SPT, DAN PEMBAYARAN PAJAK MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH

	BASE	KEPEMILIKAN NPWP		PENYAMPAIAN SPT (BASE: PUNYA NPWP)		MEMBAYAR PAJAK (BASE: PUNYA NPWP)	
		Punya NPWP	Tidak punya	Melapor kan SPT	Tidak	Memba yar Pajak	Tidak
<b>GENDER</b>							
Laki-laki	51.1	31.0	69.0	50.1	49.9	56.7	43.3
Perempuan	48.9	23.9	76.1	55.4	44.6	70.5	29.5
<b>USIA</b>							
<= 21 tahun	12.6	12.3	87.7	88.6	11.4	93.6	6.4
22 - 25 tahun	11.2	31.8	68.2	47.3	52.7	65.5	34.5
26 - 40 tahun	37.9	21.5	78.5	60.6	39.4	84.3	15.7
41 - 55 tahun	24.8	26.1	73.9	48.2	51.8	51.5	48.5
> 55 tahun	13.5	57.3	42.7	42.3	57.7	41.4	58.6
<b>ETNIS</b>							
Jawa	42.5	34.4	65.6	44.6	55.4	56.2	43.8
Sunda	14.5	25.2	74.8	53.8	46.2	67.7	32.3
Batak	3.1	33.3	66.7	92.0	8.0	93.8	6.2
Madura	3.3	28.8	71.2	65.5	34.5	42.4	57.6
Betawi	2.6	36.5	63.5	97.2	2.8	100.0	0.0
Minang	2.4	10.5	89.5	47.9	52.1	48.8	51.2
Bugis	2.5	15.2	84.8	31.9	68.1	67.8	32.2
Melayu	2.1	17.7	82.3	64.5	35.5	81.3	18.7
Lainnya	26.9	19.5	80.5	55.5	44.5	66.4	33.6
<b>AGAMA</b>							
Islam	85.8	26.8	73.2	52.9	47.1	64.2	35.8
Protestan/Katolik	10.8	23.1	76.9	82.0	18.0	90.5	9.5
Lainnya	3.4	59.3	40.7	9.1	90.9	9.1	90.9

	BASE	KEPEMILIKAN NPWP		PENYAMPAIAN SPT (BASE: PUNYA NPWP)		MEMBAYAR PAJAK (BASE: PUNYA NPWP)	
		Punya NPWP	Tidak punya	Melapor kan SPT	Tidak	Memba yar Pajak	Tidak
<b>PENDIDIKAN</b>							
<= SD	35.8	25.4	74.6	36.7	63.3	46.9	53.1
SLTP	18.3	22.3	77.7	42.1	57.9	42.6	57.4
SLTA	31.2	21.7	78.3	64.5	35.5	71.6	28.4
Kuliah	14.2	53.0	47.0	65.9	34.1	84.1	15.9
TT/TJ	.5	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>PEKERJAAN</b>							
Petani/peternak/nelayan	16.0	14.2	85.8	81.7	18.3	76.0	24.0
Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	34.1	27.3	72.7	28.8	71.2	44.5	55.5
Wiraswasta, pengusaha	7.6	46.8	53.2	77.2	22.8	89.0	11.0
Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	10.3	52.5	47.5	79.7	20.3	90.6	9.4
Ibu Rumah Tangga	19.7	19.5	80.5	24.6	75.4	29.4	70.6
Masih sekolah/kuliah	7.5	10.9	89.1	46.7	53.3	71.3	28.7
Lainnya	5.0	47.0	53.0	65.3	34.7	67.0	33.0
<b>PENDAPATAN</b>							
< 1 juta	23.2	16.3	83.7	46.6	53.4	48.1	51.9
1 - < 2 juta	32.7	27.6	72.4	22.5	77.5	38.3	61.7
2 - < 4 juta	25.1	25.8	74.2	59.1	40.9	68.8	31.2
=> 4 juta	19.0	43.2	56.8	82.5	17.5	90.9	9.1

Kepemilikan NPWP lebih banyak di kelompok laki-laki, usia lebih dari 55 tahun, etnis, Betawi, Jawa, dan Batak, pendidikan tinggi, pendapatan lebih dari 4 juta per bulan, terutama kalangan pegawai dan wiraswasta.

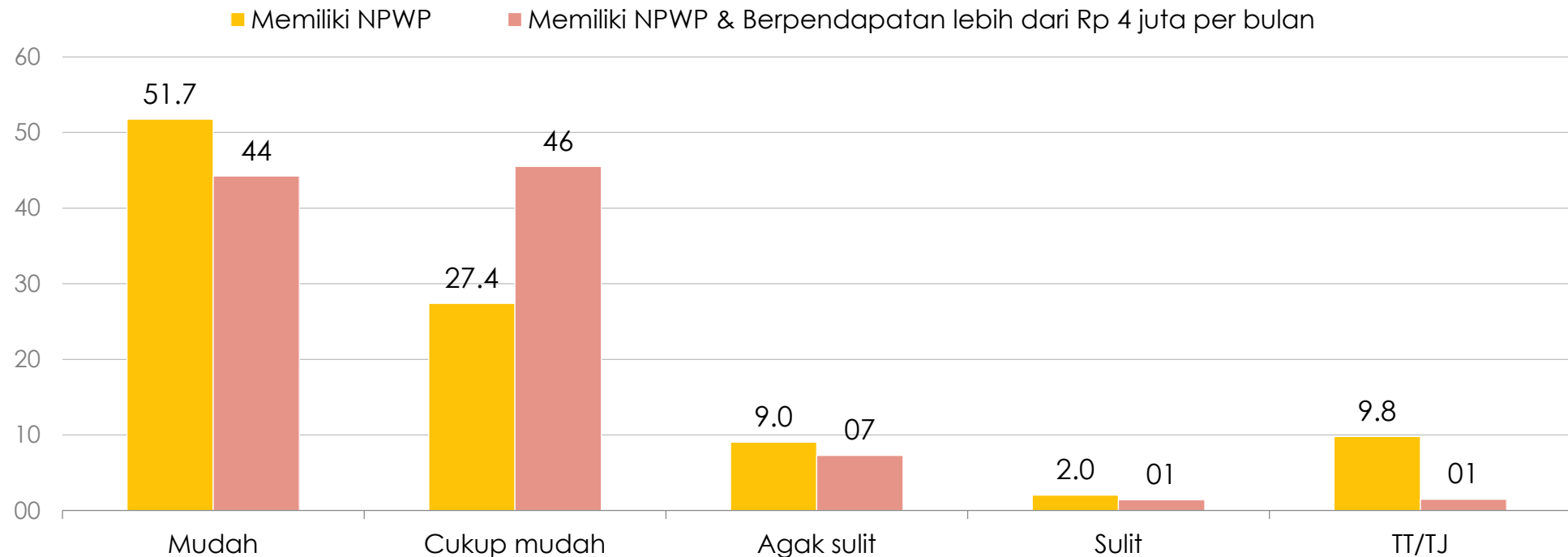
# KEPEMILIKAN NPWP, PERILAKU PENYAMPAIAN SPT, DAN PEMBAYARAN PAJAK MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH

	BASE	KEPEMILIKAN NPWP		PENYAMPAIAN SPT (BASE: PUNYA NPWP)		MEMBAYAR PAJAK (BASE: PUNYA NPWP)	
		Punya NPWP	Tidak punya	Melapor kan SPT	Tidak	Memba yar Pajak	Tidak
<b>DESA/KOTA</b>							
Pedesaan	<b>49.7</b>	25.6	74.4	47.7	52.3	53.4	46.6
Perkotaan	<b>50.3</b>	29.4	70.6	56.4	43.6	70.4	29.6
<b>WILAYAH</b>							
SUMATERA	<b>20.6</b>	25.2	74.8	54.9	45.1	63.4	36.6
BANTEN	<b>4.3</b>	36.7	63.3	85.9	14.1	93.2	6.8
DKI	<b>4.4</b>	44.0	56.0	69.9	30.1	71.3	28.7
JABAR	<b>17.2</b>	30.2	69.8	46.5	53.5	53.3	46.7
JATENG DIY	<b>15.9</b>	35.5	64.5	44.3	55.7	48.1	51.9
JATIM	<b>16.6</b>	27.3	72.7	32.8	67.2	62.4	37.6
BALI NUSA	<b>4.9</b>	6.2	93.8	38.4	61.6	77.7	22.3
KALIMANTAN	<b>5.7</b>	21.0	79.0	75.2	24.8	67.0	33.0
SULAWESI	<b>7.3</b>	17.3	82.7	81.0	19.0	86.7	13.3
MALUKU PAPUA	<b>3.1</b>	21.2	78.8	60.6	39.4	93.2	6.8

NPWP lebih banyak dimiliki warga yang tinggal di perkotaan, terutama di wilayah DKI Jakarta.

# KEMUDAHAN MEMBAYAR PAJAK

Apakah Ibu/Bapak merasa pembayaran pajak dapat dilakukan dengan mudah, cukup mudah, agak sulit atau sulit?... (%)  
(Base: Memiliki NPWP)



Dari yang memiliki NPWP, mayoritas merasa pembayaran pajak dapat secara mudah atau cukup mudah dilakukan. Demikian pula mereka yang memiliki NPWP dan berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan.

# KEMUDAHAN MEMBAYAR PAJAK MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH (BASE: PUNYA NPWP)

	BASE (PUNYA NPWP)	Mudah/Cuku p mudah	Agak sulit/Sulit	TJ
<b>GENDER</b>				
Laki-laki	57.5	86.6	10.8	2.6
Perempuan	42.5	69.0	11.5	19.6
<b>USIA</b>				
<= 21 tahun	5.6	94.6	5.4	0.0
22 - 25 tahun	12.9	92.6	5.8	1.7
26 - 40 tahun	29.6	70.8	21.0	8.1
41 - 55 tahun	23.6	81.8	12.4	5.7
> 55 tahun	28.2	76.4	3.1	20.6
<b>ETNIS</b>				
Jawa	53.3	87.8	9.1	3.2
Sunda	13.3	70.1	14.2	15.6
Batak	3.7	98.2	0.0	1.8
Madura	3.5	96.3	1.4	2.3
Betawi	3.5	91.4	8.6	0.0
Minang	0.9	60.4	32.6	7.0
Bugis	1.4	37.2	62.8	0.0
Melayu	1.4	66.8	33.2	0.0
Lainnya	19.1	57.0	12.6	30.5
<b>AGAMA</b>				
Islam	83.6	85.6	9.9	4.5
Protestan/Katolik	9.1	70.7	26.9	2.4
Lainnya	7.3	15.5	5.2	79.2

	BASE (PUNYA NPWP)	Mudah/Cuku p mudah	Agak sulit/Sulit	TJ
<b>PENDIDIKAN</b>				
<= SD	33.1	86.5	3.6	9.9
SLTP	14.8	53.0	6.9	40.1
SLTA	24.7	80.5	18.7	0.8
Kuliah	27.4	83.2	15.4	1.4
TT/TJ	.0	0.0	0.0	0.0
<b>PEKERJAAN</b>				
Petani/peternak/nelayan	8.2	80.8	19.2	0.0
Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	33.9	87.0	2.8	10.2
Wiraswasta, pengusaha	12.9	79.9	18.6	1.5
Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	19.6	79.0	19.2	1.9
Ibu Rumah Tangga	13.9	43.6	14.5	41.9
Masih sekolah/kuliah	3.0	94.5	5.5	0.0
Lainnya	8.5	96.6	3.4	0.0
<b>PENDAPATAN</b>				
< 1 juta	13.8	85.3	6.1	8.6
1 - < 2 juta	32.8	67.9	7.4	24.6
2 - < 4 juta	23.5	77.6	22.0	0.3
=> 4 juta	29.9	89.8	8.7	1.5

Dari yang memiliki NPWP, mayoritas atau kebanyakan merasa mudah dalam membayar pajak hampir pada setiap kelompok demografi.

# KEMUDAHAN MEMBAYAR PAJAK MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH (BASE: PUNYA NPWP)

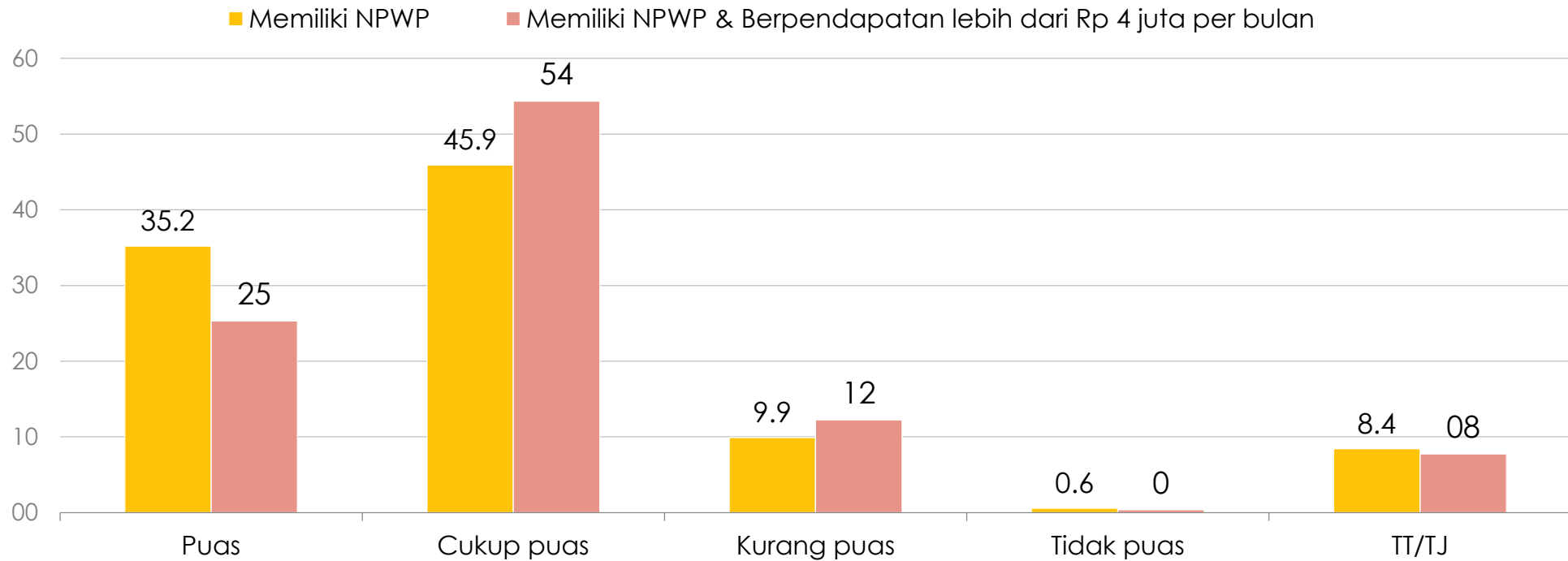
	BASE (PUNYA NPWP)	Mudah/Cukup mudah	Agak sulit/Sulit	TJ
<b>DESA/KOTA</b>				
Pedesaan	<b>46.3</b>	87.4	9.9	2.7
Perkotaan	<b>53.7</b>	72.0	12.1	15.9
<b>WILAYAH</b>				
SUMATERA	<b>18.8</b>	62.3	6.5	31.2
BANTEN	<b>5.7</b>	54.3	6.9	38.8
DKI	<b>7.0</b>	94.4	5.6	0.0
JABAR	<b>18.9</b>	89.3	10.3	0.3
JATENG DIY	<b>20.6</b>	85.4	7.9	6.7
JATIM	<b>16.5</b>	84.5	14.1	1.5
BALI NUSA	<b>1.1</b>	60.7	39.3	0.0
KALIMANTAN	<b>4.4</b>	76.0	24.0	0.0
SULAWESI	<b>4.6</b>	82.2	17.8	0.0
MALUKU PAPUA	<b>2.4</b>	64.1	35.9	0.0

Dari yang memiliki NPWP, mayoritas atau kebanyakan merasa mudah dalam membayar pajak hampir pada setiap kelompok demografi.

# EVALUASI TERHADAP PELAYANAN PETUGAS PAJAK

Seberapa puas Ibu/Bapak dengan pelayanan yang diberikan petugas pajak ketika Ibu/Bapak berhubungan/berurusan dengan kantor pajak, apakah puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas?... (%)

**(Base: Memiliki NPWP)**



Dari yang memiliki NPWP, mayoritas merasa puas/cukup puas dengan pelayanan yang diberikan petugas pajak. Demikian pula mereka yang memiliki NPWP dan berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan.

# EVALUASI TERHADAP PELAYANAN PETUGAS PAJAK MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH (BASE: PUNYA NPWP)

	BASE (PUNYA NPWP)	Puas/Cukup puas	Kurang puas/Tidak puas	TJ
<b>GENDER</b>				
Laki-laki	57.5	85.5	13.9	0.6
Perempuan	42.5	75.1	5.9	19.1
<b>USIA</b>				
<= 21 tahun	5.6	98.4	1.6	0.0
22 - 25 tahun	12.9	95.7	3.8	0.5
26 - 40 tahun	29.6	76.0	22.9	1.0
41 - 55 tahun	23.6	77.3	13.2	9.5
> 55 tahun	28.2	79.4	0.0	20.6
<b>ETNIS</b>				
Jawa	53.3	94.2	5.1	0.7
Sunda	13.3	88.7	11.3	0.0
Batak	3.7	57.9	42.1	0.0
Madura	3.5	93.7	3.2	3.0
Betawi	3.5	67.3	32.7	0.0
Minang	0.9	86.6	6.4	7.0
Bugis	1.4	34.6	65.4	0.0
Melayu	1.4	67.5	31.9	0.7
Lainnya	19.1	48.0	10.6	41.4
<b>AGAMA</b>				
Islam	83.6	87.9	9.1	2.9
Protestan/Katolik	9.1	71.4	27.0	1.6
Lainnya	7.3	15.5	5.2	79.2

	BASE (PUNYA NPWP)	Puas/Cukup puas	Kurang puas/Tidak puas	TJ
<b>PENDIDIKAN</b>				
<= SD	33.1	91.6	8.4	0.0
SLTP	14.8	52.9	7.0	40.1
SLTA	24.7	76.4	14.9	8.6
Kuliah	27.4	87.9	10.9	1.2
TT/TJ	.0	0.0	0.0	0.0
<b>PEKERJAAN</b>				
Petani/peternak/nelayan	8.2	69.4	30.6	0.0
Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	33.9	95.0	4.6	0.5
Wiraswasta, pengusaha	12.9	65.1	17.2	17.7
Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	19.6	82.2	16.9	0.9
Ibu Rumah Tangga	13.9	53.8	4.3	41.9
Masih sekolah/kuliah	3.0	96.5	3.5	0.0
Lainnya	8.5	98.2	1.8	0.0
<b>PENDAPATAN</b>				
< 1 juta	13.8	95.1	4.9	0.0
1 - < 2 juta	32.8	76.9	4.8	18.3
2 - < 4 juta	23.5	80.6	19.0	0.4
=> 4 juta	29.9	79.7	12.6	7.7

Dari yang memiliki NPWP, mayoritas atau kebanyakan merasa puas terhadap pelayanan petugas pajak, kecuali di kelompok etnis Bugis di wilayah Sulawesi.

# EVALUASI TERHADAP PELAYANAN PETUGAS PAJAK MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH (BASE: PUNYA NPWP)

	BASE (PUNYA NPWP)	Puas/Cukup puas	Kurang puas/Tidak puas	TJ
<b>DESA/KOTA</b>				
Pedesaan	46.3	84.2	10.9	4.8
Perkotaan	53.7	78.4	10.1	11.5
<b>WILAYAH</b>				
SUMATERA	18.8	55.0	14.1	30.9
BANTEN	5.7	90.5	9.5	0.0
DKI	7.0	79.5	20.5	0.0
JABAR	18.9	91.0	8.6	0.3
JATENG DIY	20.6	95.2	3.8	0.9
JATIM	16.5	91.5	6.9	1.6
BALI NUSA	1.1	92.6	7.4	0.0
KALIMANTAN	4.4	73.5	26.5	0.0
SULAWESI	4.6	35.4	19.0	45.6
MALUKU PAPUA	2.4	93.2	6.8	0.0

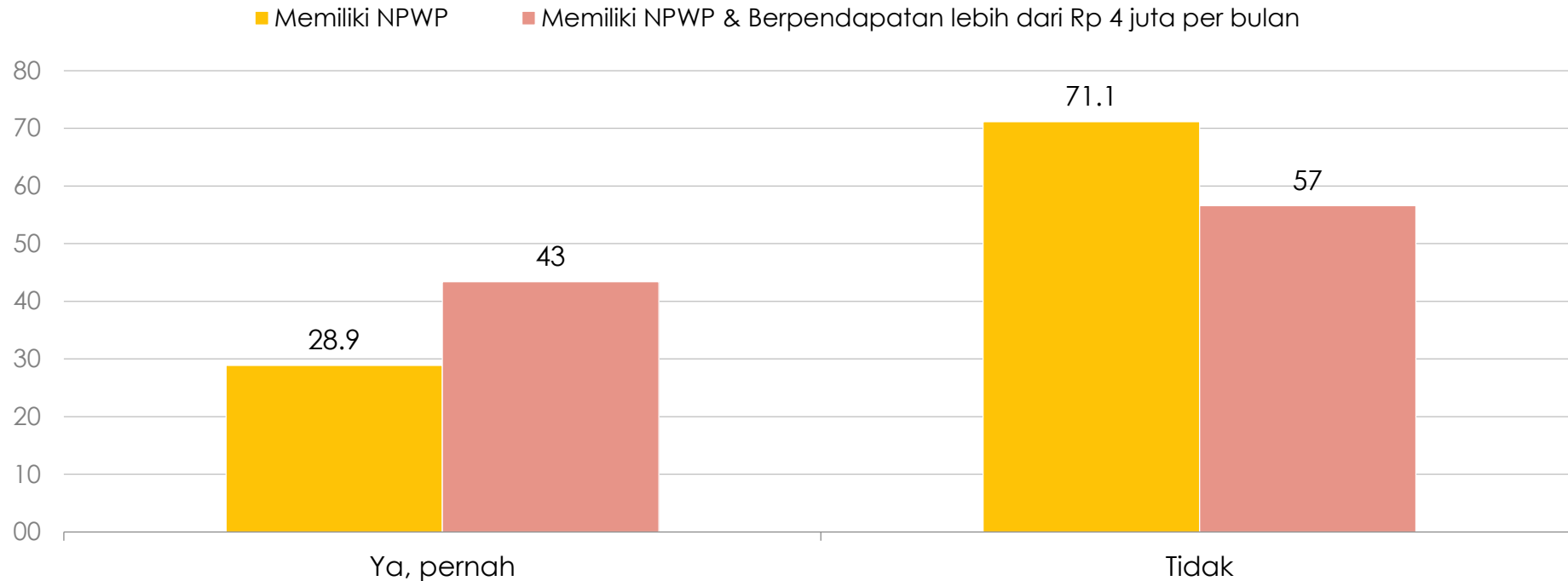
Dari yang memiliki NPWP, mayoritas atau kebanyakan merasa puas terhadap pelayanan petugas pajak, kecuali di kelompok etnis Bugis di wilayah Sulawesi.





# NIK AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI PENGANTI NOMOR NPWP

Apakah Ibu/Bapak mengetahui bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan digunakan sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?... (%)  
**(Base: Memiliki NPWP)**



Baru sekitar 28.9% publik yang tahu bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan digunakan sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sementara di kelompok yang berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan lebih banyak yang tahu, 43.4%.

# TEMUAN

- Secara umum sekitar 27.5% memiliki NPWP, dari yang memiliki NPWP sekitar 52.4% pernah menyampaikan SPT pajak dan 62.6% mengaku membayar PPh baik secara langsung atau melalui perusahaan tempat bekerjanya.
- Di kelompok yang berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan, kepemilikan NPWP jauh lebih banyak, 43%. Begitu juga yang menyampaikan SPT pajak, dan yang membayar pajak.
- Kepemilikan NPWP lebih banyak di kelompok laki-laki, usia lebih dari 55 tahun, etnis, Betawi, Jawa, dan Batak, pendidikan tinggi, pendapatan lebih dari 4 juta per bulan, terutama kalangan pegawai dan wiraswasta.
- NPWP lebih banyak dimiliki warga yang tinggal di perkotaan, terutama di wilayah DKI Jakarta.
- Dari yang memiliki NPWP, mayoritas merasa pembayaran pajak dapat secara mudah atau cukup mudah dilakukan. Demikian pula mereka yang memiliki NPWP dan berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan.

# TEMUAN

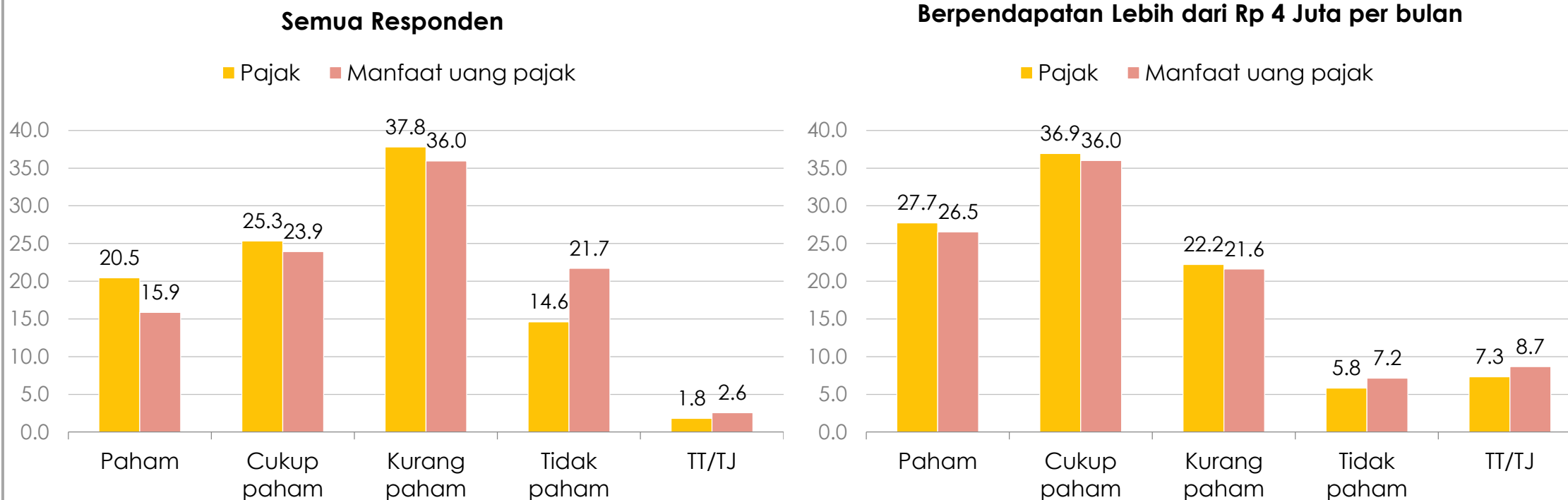
- Dari yang memiliki NPWP, mayoritas atau kebanyakan merasa mudah dalam membayar pajak hampir pada setiap kelompok demografi.
- Dari yang memiliki NPWP, mayoritas merasa puas/cukup puas dengan pelayanan yang diberikan petugas pajak. Demikian pula mereka yang memiliki NPWP dan berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan.
- Dari yang memiliki NPWP, mayoritas atau kebanyakan merasa puas terhadap pelayanan petugas pajak, kecuali di kelompok etnis Bugis di wilayah Sulawesi.
- Baru sekitar 28.9% publik yang tahu bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan digunakan sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sementara di kelompok yang berpendapatan lebih dari Rp 4 juta lebih banyak yang tahu, 43.4%.

# PERSEPSI TENTANG PAJAK

---

# PEMAHAMAN TERHADAP PAJAK DAN UANG PAJAK

Apakah Ibu/Bapak paham, cukup paham, kurang paham atau tidak paham tentang apa yang dimaksud dengan ...?... (%)

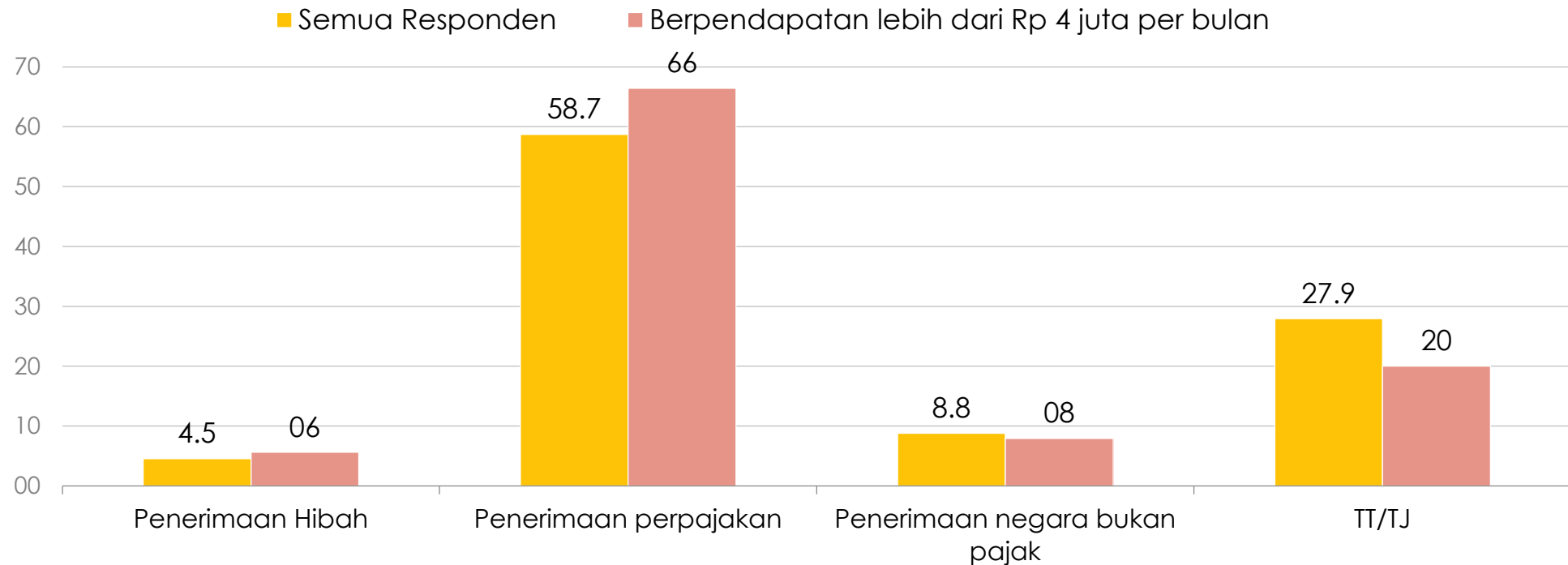


Mayoritas publik saat ini masih kurang/tidak paham tentang pajak (52.4%) dan manfaat uang pajak (57.7%), sementara yang memahami pajak sekitar 45.3%, dan yang memahami manfaat uang pajak sekitar 39.8%. Pada kelompok yang berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan, mayoritas paham pajak (64.7%) dan manfaat pajak (62.6%).



# SUMBER PENERIMAAN TERBESAR NEGARA

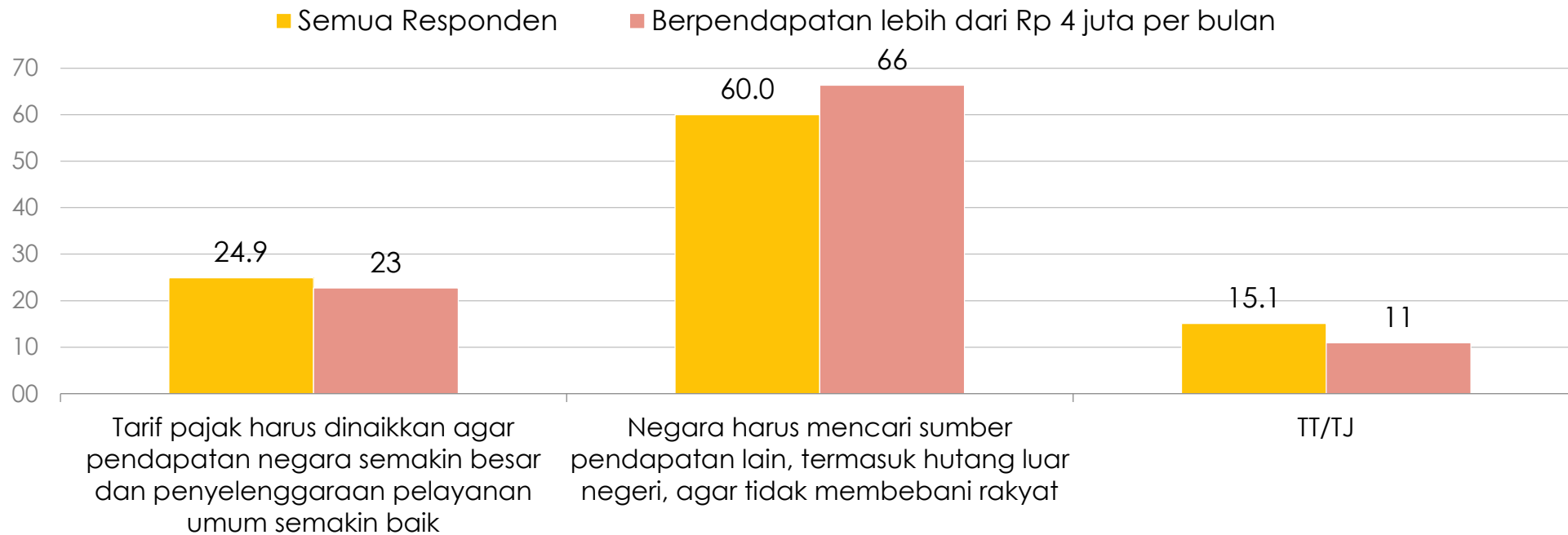
Menurut Ibu/Bapak dari manakah sumber penerimaan terbesar negara kita?... (%)



Mayoritas, 58.7%, menyebutkan bahwa sumber penerimaan terbesar negara dari penerimaan perpajakan.

# TARIF PAJAK HARUS DINAIKKAN ATAU NEGARA HARUS MENCARI SUMBER PENDAPATAN LAIN

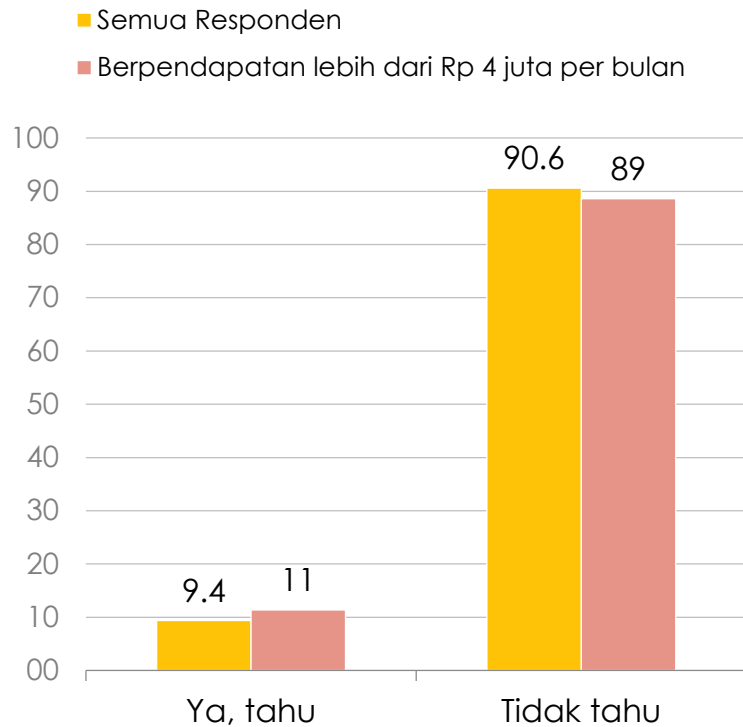
Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam penyediaan layanan umum. Di antara dua pendapat berikut, mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri?... (%)



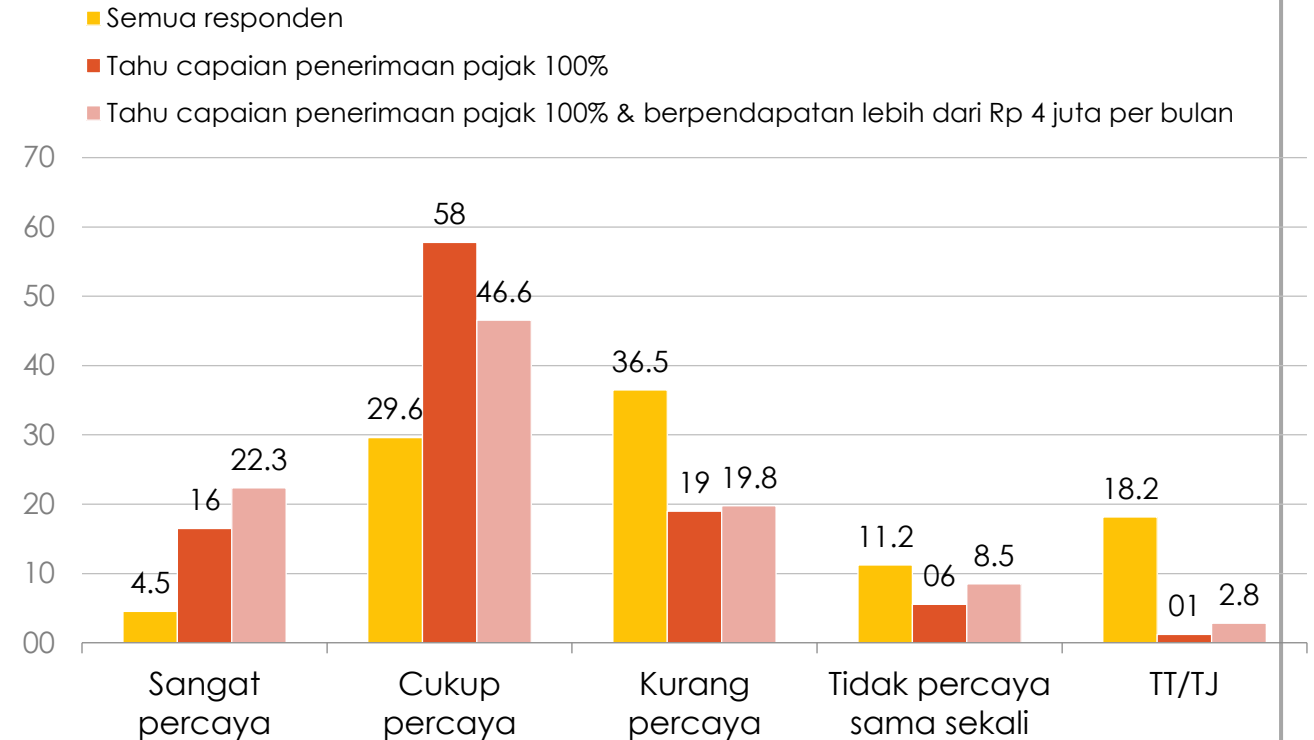
Lebih banyak yang merasa sesuai dengan pernyataan bahwa “Negara harus mencari sumber pendapatan lain, termasuk hutang luar negeri, agar tidak membebani rakyat”.

# CAPAIAN PENERIMAAN PAJAK 100% DARI TARGET APBN

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar berita tentang capaian penerimaan pajak pemerintah di tahun 2021 yang mencapai lebih dari 100% dari target yang ditetapkan dalam APBN?... (%)



Seberapa percaya Ibu/Bapak terhadap berita tersebut? ... (%)

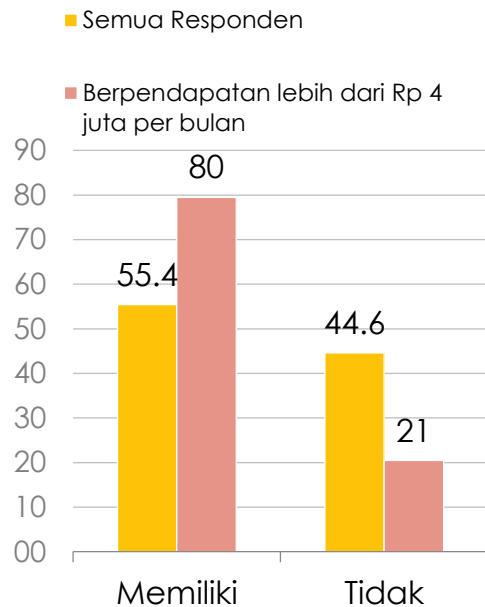


Hanya sekitar 9.4% yang tahu, di kelompok berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan juga masih sedikit yang tahu, hanya 11.4%.

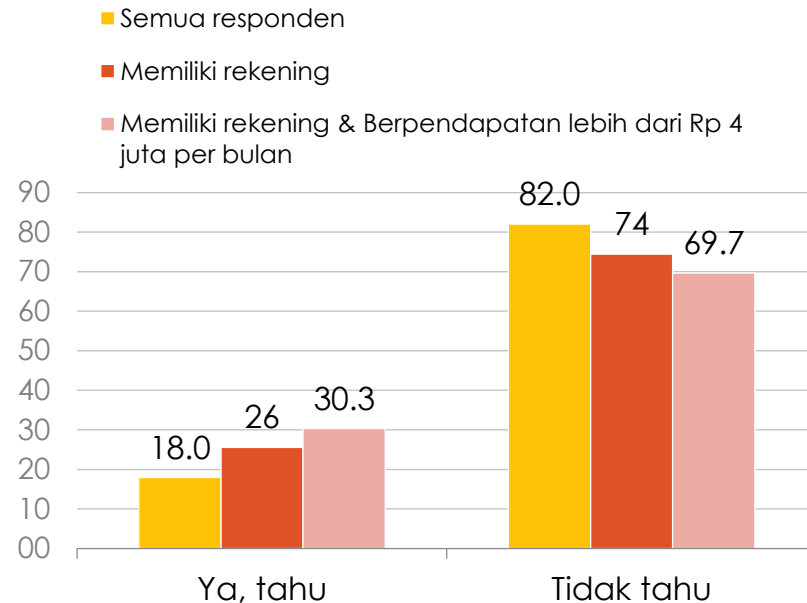


# DJP MEMILIKI WEWENANG UNTUK MENGETAHUI DATA REKENING NASABAH PERBANKAN

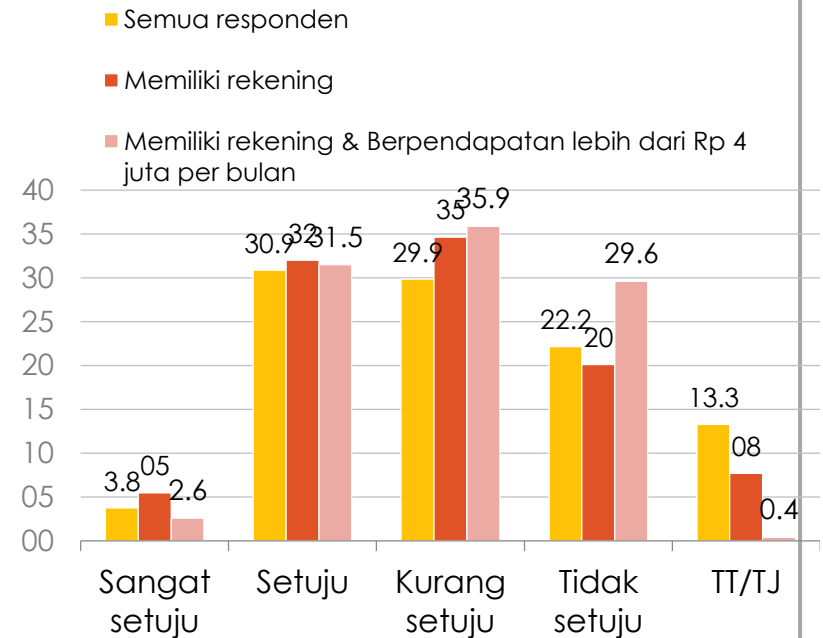
Apakah Ibu/Bapak memiliki rekening di Bank?... (%)



Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki wewenang untuk mengetahui data rekening nasabah perbankan sehingga dapat diketahui besaran kewajiban membayar pajak pemilik rekening?... (%)



Seberapa setuju Ibu/Bapak dengan wewenang yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut, apakah sangat setuju, setuju, kurang setuju atau tidak setuju sama sekali?... (%)



Sekitar 55.4% memiliki rekening di Bank. Dari yang memiliki rekening Bank, baru 25.6% yang tahu kewenangan DJP tersebut dan mayoritas tidak setuju dengan wewenang yang dimiliki DJP tersebut.

# DJP MEMILIKI WEWENANG UNTUK MENGETAHUI DATA REKENING NASABAH PERBANKAN MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH

	TAHU WEWENANG DJP UNTUK MELIHAT REKENING NASABAH			SIKAP TERHADAP WEWENANG YANG DIMILIKI DJP		
	BASE	Ya, tahu	Tidak tahu	Sangat setuju/setuju	Kurang setuju/Tidak setuju sama sekali	TJ
<b>GENDER</b>						
Laki-laki	51.1	19.7	80.3	36.9	45.5	17.7
Perempuan	48.9	16.1	83.9	32.3	58.9	8.8
<b>USIA</b>						
<= 21 tahun	12.6	20.1	79.9	39.4	59.6	1.0
22 - 25 tahun	11.2	28.6	71.4	35.5	56.3	8.3
26 - 40 tahun	37.9	18.6	81.4	34.8	52.2	13.0
41 - 55 tahun	24.8	15.1	84.9	38.3	46.8	15.0
> 55 tahun	13.5	10.7	89.3	22.5	50.8	26.7
<b>ETNIS</b>						
Jawa	42.5	18.0	82.0	34.6	49.0	16.4
Sunda	14.5	21.5	78.5	40.5	48.2	11.2
Batak	3.1	32.6	67.4	36.7	61.0	2.3
Madura	3.3	22.8	77.2	33.5	51.5	15.0
Betawi	2.6	29.3	70.7	20.6	79.4	0.0
Minang	2.4	22.5	77.5	39.6	47.2	13.2
Bugis	2.5	21.1	78.9	26.3	50.5	23.2
Melayu	2.1	4.3	95.7	29.5	51.3	19.2
Lainnya	26.9	13.0	87.0	33.6	56.0	10.5
<b>AGAMA</b>						
Islam	85.8	18.4	81.6	35.5	51.3	13.2
Protestan/Katolik	10.8	17.8	82.2	35.1	46.2	18.7
Lainnya	3.4	8.3	91.7	11.6	88.4	0.0

Lebih banyak yang tahu di kelompok laki-laki, usia muda, etnis Batak, muslim, pendidikan tinggi, berpendapatan lebih dari 2 juta, dari yang tahu lebih banyak yang tidak setuju dengan wewenang tersebut di setiap kelompok demografi.

	TAHU WEWENANG DJP UNTUK MELIHAT REKENING NASABAH			SIKAP TERHADAP WEWENANG YANG DIMILIKI DJP		
	BASE	Ya, tahu	Tidak tahu	Sangat setuju/setuju	Kurang setuju/Tidak setuju sama sekali	TJ
<b>PENDIDIKAN</b>						
<= SD	35.8	14.9	85.1	39.2	33.0	27.8
SLTP	18.3	6.8	93.2	29.3	59.3	11.4
SLTA	31.2	21.5	78.5	33.0	63.2	3.8
Kuliah	14.2	33.0	67.0	34.2	65.2	.6
TT/TJ	.5	0.0	100.0	20.3	79.7	0.0
<b>PEKERJAAN</b>						
Petani/peternak/nelayan	16.0	10.2	89.8	34.1	52.5	13.3
Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	34.1	16.7	83.3	38.7	41.5	19.8
Wiraswasta, pengusaha	7.6	25.6	74.4	37.7	58.8	3.6
Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	10.3	27.6	72.4	34.4	65.2	.4
Ibu Rumah Tangga	19.7	9.7	90.3	25.1	55.4	19.5
Masih sekolah/kuliah	7.5	29.0	71.0	45.5	53.6	.9
Lainnya	5.0	36.7	63.3	29.0	65.1	5.8
<b>PENDAPATAN</b>						
< 1 juta	23.2	12.1	87.9	28.6	44.3	27.1
1 - < 2 juta	32.7	12.9	87.1	37.1	47.8	15.1
2 - < 4 juta	25.1	24.8	75.2	40.1	51.9	8.1
=> 4 juta	19.0	24.9	75.1	30.7	69.0	.3

# DJP MEMILIKI WEWENANG UNTUK MENGETAHUI DATA REKENING NASABAH PERBANKAN MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH

	BASE	TAHU WEWENANG DJP UNTUK MELIHAT REKENING NASABAH		SIKAP TERHADAP WEWENANG YANG DIMILIKI DJP		
		Ya, tahu	Tidak tahu	Sangat setuju/setuju	Kurang setuju/Tidak setuju sama sekali	TJ
<b>DESA/KOTA</b>						
Pedesaan	49.7	14.7	85.3	39.0	43.4	17.6
Perkotaan	50.3	21.2	78.8	30.4	60.6	9.0
<b>WILAYAH</b>						
SUMATERA	20.6	16.7	83.3	35.3	56.8	7.9
BANTEN	4.3	38.1	61.9	38.7	59.8	1.5
DKI	4.4	29.4	70.6	32.8	67.2	0.0
JABAR	17.2	17.6	82.4	30.8	53.0	16.2
JATENG DIY	15.9	15.6	84.4	44.9	37.8	17.3
JATIM	16.6	16.2	83.8	33.9	52.3	13.8
BALI NUSA	4.9	4.7	95.3	23.4	50.5	26.1
KALIMANTAN	5.7	12.2	87.8	40.2	52.1	7.7
SULAWESI	7.3	29.4	70.6	22.4	57.5	20.2
MALUKU PAPUA	3.1	10.4	89.6	36.6	44.0	19.4

Lebih banyak yang tahu di kelompok perkotaan terutama di wilayah Banten, dari yang tahu lebih banyak yang tidak setuju dengan wewenang tersebut di setiap wilayah, kecuali di wilayah Jawa Tengah DIY.

# TEMUAN

- Mayoritas publik saat ini masih kurang/tidak paham tentang pajak (52.4%) dan manfaat uang pajak (57.7%), sementara yang memahami pajak sekitar 45.3%, dan yang memahami manfaat uang pajak sekitar 39.8%. Pada kelompok yang berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan, mayoritas paham pajak (64.7%) dan manfaat pajak (62.6%).
- Mayoritas, 58.7%, menyebutkan bahwa sumber penerimaan terbesar negara dari penerimaan perpajakan.

# TEMUAN

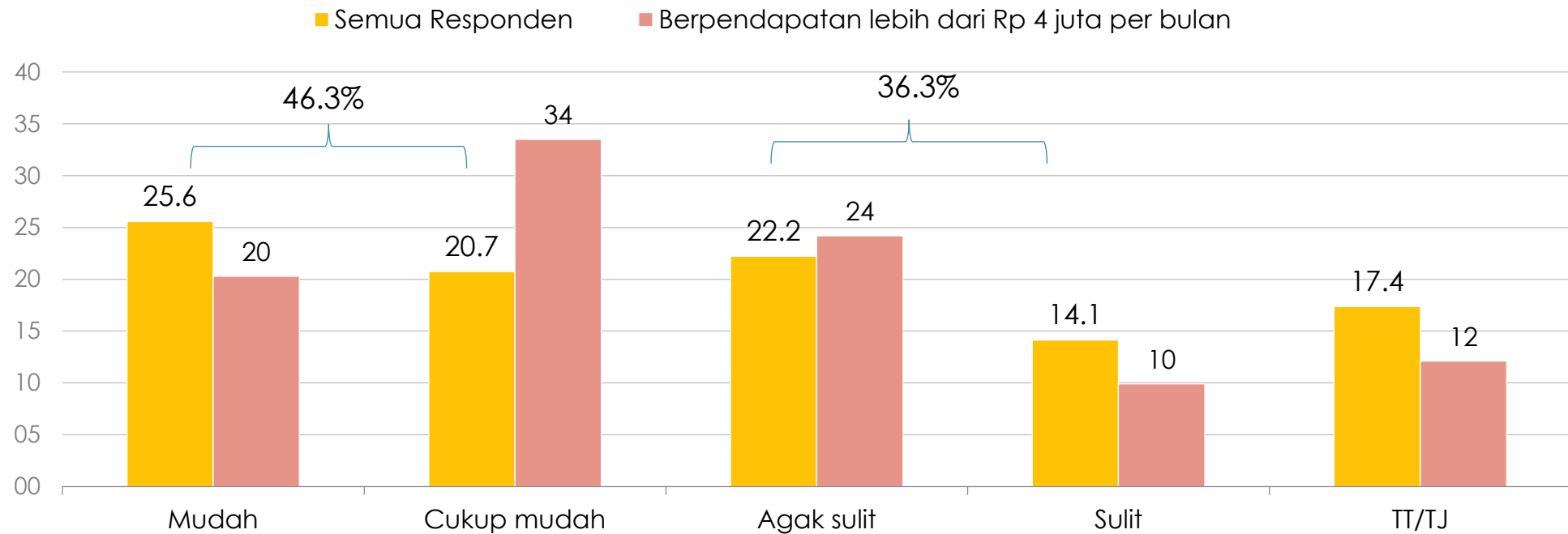
- Lebih banyak yang merasa sesuai dengan pernyataan bahwa “Negara harus mencari sumber pendapatan lain, termasuk hutang luar negeri, agar tidak membebani rakyat”.
- Hanya sekitar 9.4% yang tahu, di kelompok berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan juga masih sedikit yang tahu, hanya 11.4%.
- Sekitar 55.4% memiliki rekening di Bank. Dari yang memiliki rekening Bank, baru 25.6% yang tahu kewenangan DJP tersebut dan mayoritas tidak setuju dengan wewenang yang dimiliki DJP tersebut.
- Lebih banyak yang tahu di kelompok laki-laki, usia muda, etnis Batak, muslim, pendidikan tinggi, berpendapatan lebih dari 2 juta, dari yang tahu lebih banyak yang tidak setuju dengan wewenang tersebut di setiap kelompok demografi.
- Lebih banyak yang tahu di kelompok perkotaan terutama di wilayah Banten, dari yang tahu lebih banyak yang tidak setuju dengan wewenang tersebut di setiap wilayah, kecuali di wilayah Jawa Tengah DIY.

# PEMBAYARAN PAJAK

---

# KEMUDAHAN DALAM MENUNAIKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

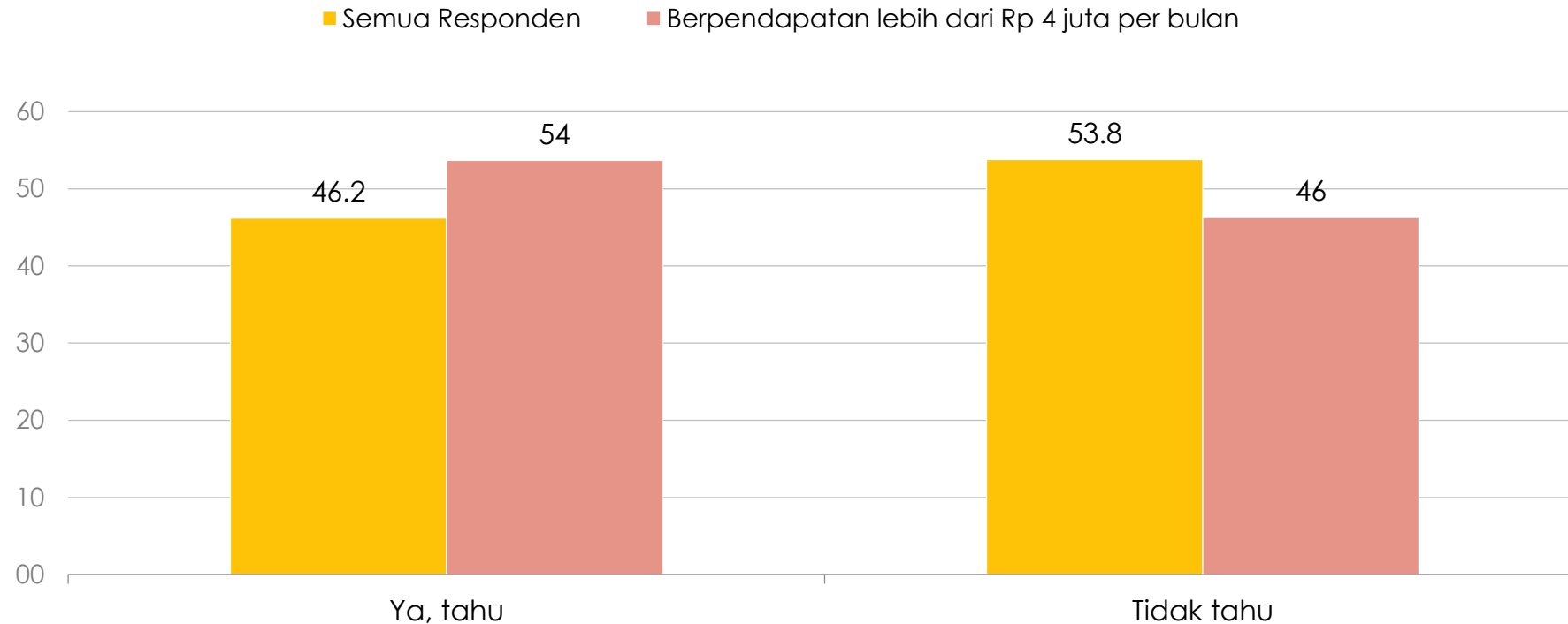
Apakah Ibu/Bapak merasa mudah, cukup mudah, agak sulit atau sulit dalam menunaikan kewajiban perpajakan Ibu/Bapak sendiri?... (%)



Lebih banyak yang merasa mudah/cukup mudah, 46.3% dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Di kalangan pendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan, mayoritas merasa mudah/cukup mudah menunaikan kewajiban perpajakan.

# ADANYA SANKSI JIKA TIDAK MEMBAYAR PAJAK

Apakah Ibu/Bapak mengetahui adanya sanksi yang dikenakan apabila Ibu/Bapak tidak menunaikan kewajiban perpajakan? ... (%)



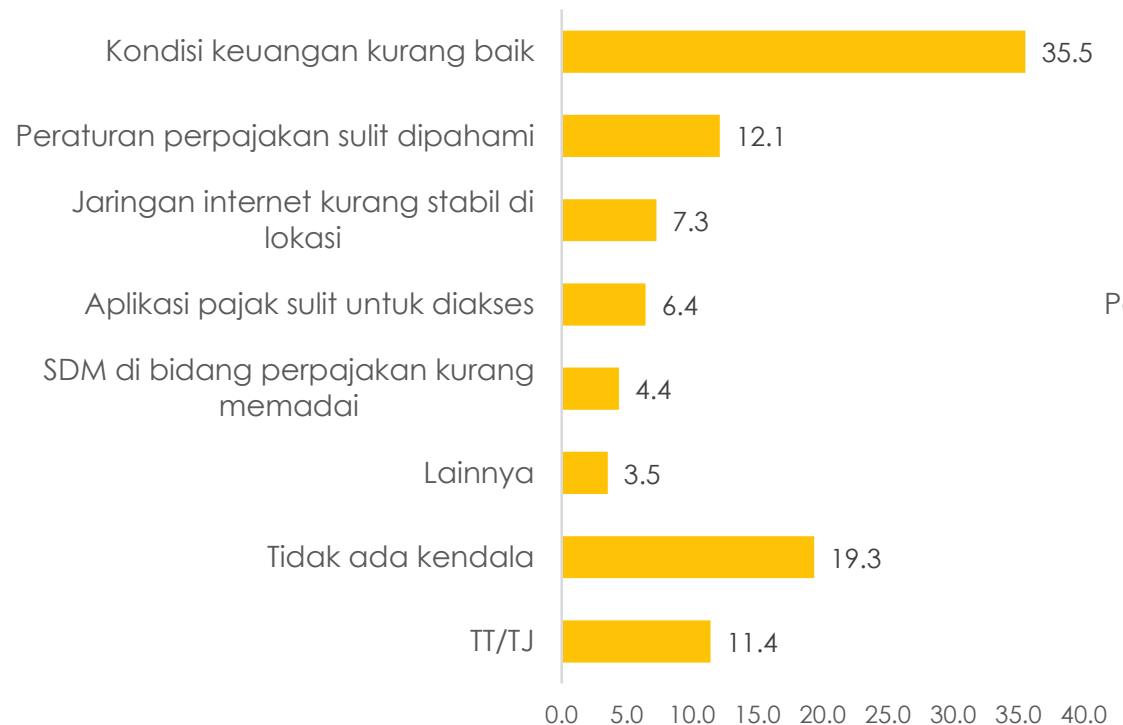
Sekitar 46.2% tahu adanya sanksi yang dikenakan apabila Ibu/Bapak tidak menunaikan kewajiban perpajakan. Awareness ini lebih tinggi di kelompok yang berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan, 54%.



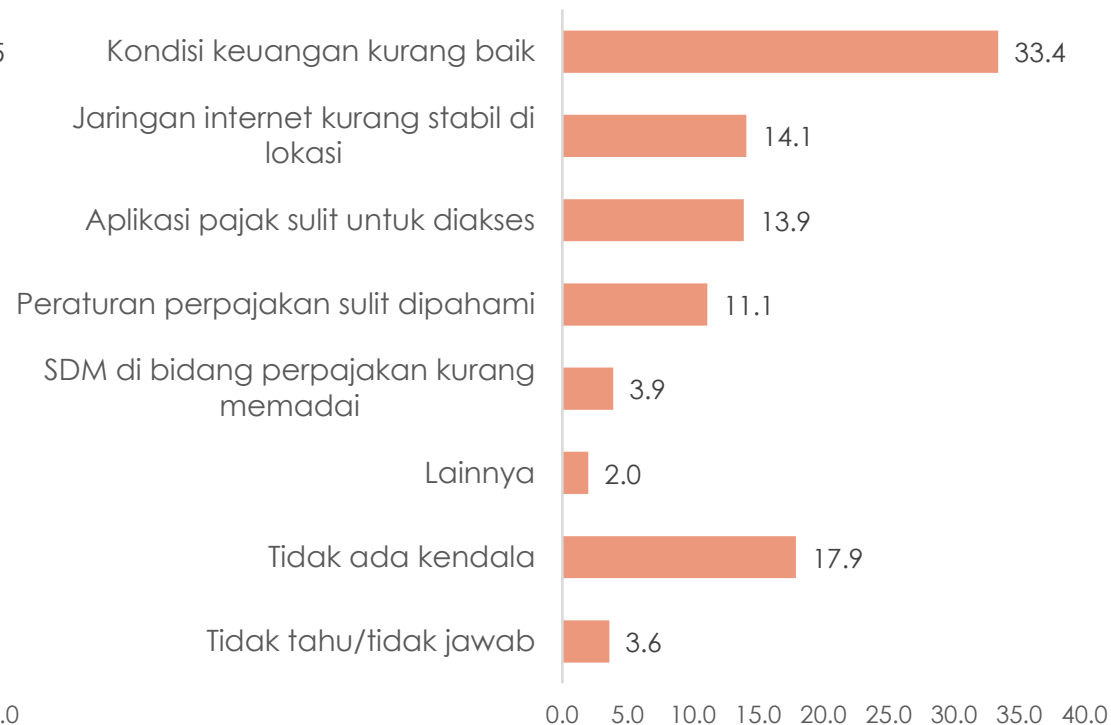
# KENDALA DALAM MENUNAIKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Apakah kendala utama Ibu/Bapak dalam menunaikan kewajiban perpajakan?... (%)

## Semua Responden



## Berpendapatan Lebih dari Rp 4 Juta per bulan



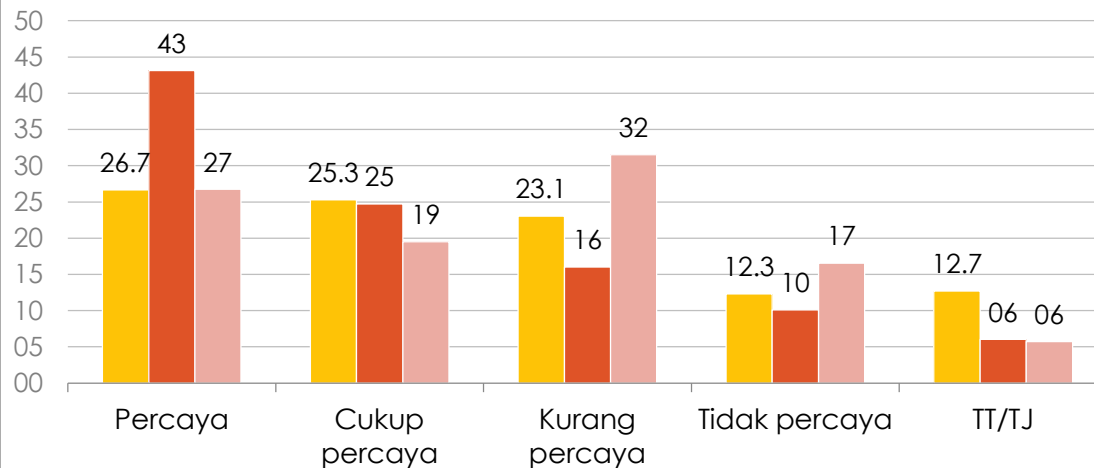
Kendala paling banyak dalam menunaikan kewajiban perpajakan adalah karena kondisi keuangan yang kurang baik, baik pada semua responden maupun mereka yang berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan.

# TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KINERJA OTORITAS PAJAK

Apakah Ibu/Bapak percaya, cukup percaya, kurang percaya atau tidak percaya bahwa ...?... (%)

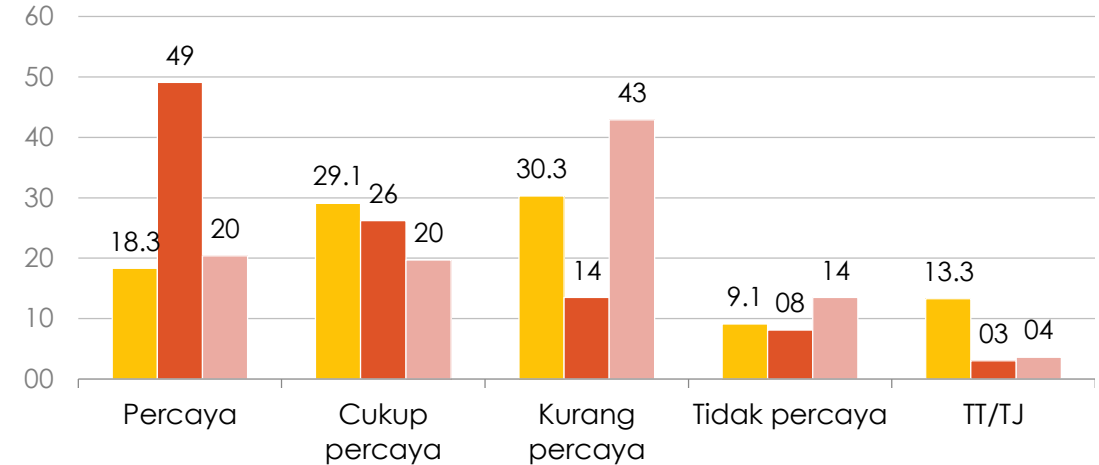
## Semua Responden

- Otoritas pajak telah menjalankan tugasnya dengan baik
- Pajak merupakan bentuk dari prinsip gotong royong
- Uang pajak telah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan kepentingan rakyat



## Berpendapatan Lebih dari Rp 4 Juta per bulan

- Otoritas pajak telah menjalankan tugasnya dengan baik
- Pajak merupakan bentuk dari prinsip gotong royong
- Uang pajak telah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan kepentingan rakyat



Paling banyak percaya/cukup percaya bahwa Pajak merupakan bentuk dari prinsip gotong royong (67.8%), terutama mereka yang berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan, baru kemudian Otoritas pajak telah menjalankan tugasnya dengan baik (51.9%). Akan tetapi, warga terbelah antara yang cenderung percaya (46.2%) dan cenderung tidak percaya (48.1%) bahwa uang pajak telah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan kepentingan rakyat. Namun, mereka yang berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan mayoritas cenderung tidak percaya.



# TEMUAN

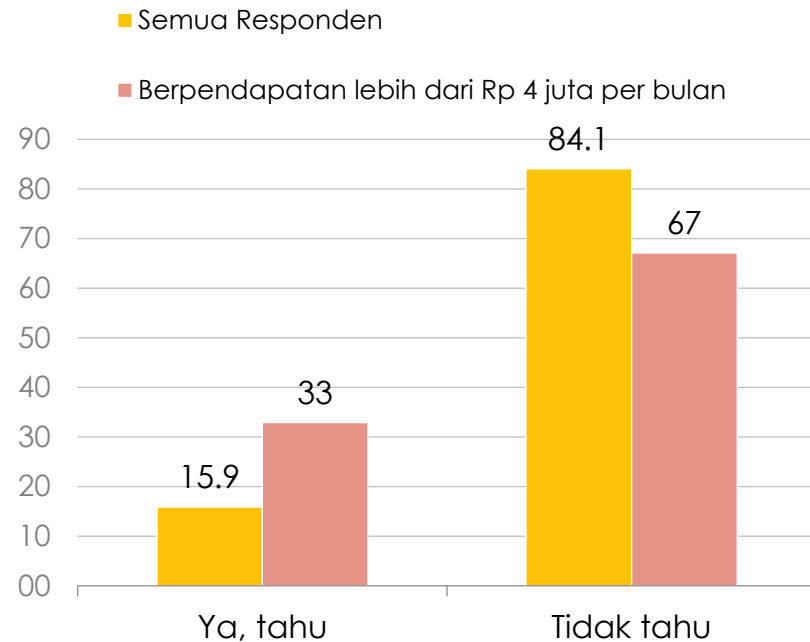
- Lebih banyak yang merasa mudah/cukup mudah, 46.3% dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Di kalangan pendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan, mayoritas merasa mudah/cukup mudah menunaikan kewajiban perpajakan.
- Sekitar 46.2% tahu adanya sanksi yang dikenakan apabila Ibu/Bapak tidak menunaikan kewajiban perpajakan. Awareness ini lebih tinggi di kelompok yang berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan, 54%.
- Kendala paling banyak dalam menunaikan kewajiban perpajakan adalah karena kondisi keuangan yang kurang baik, baik pada semua responden maupun mereka yang berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan.
- Paling banyak percaya/cukup percaya bahwa Pajak merupakan bentuk dari prinsip gotong royong (67.8%), terutama mereka yang berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan, baru kemudian Otoritas pajak telah menjalankan tugasnya dengan baik (51.9%). Akan tetapi, warga terbelah antara yang cenderung percaya (46.2%) dan cenderung tidak percaya (48.1%) bahwa uang pajak telah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan kepentingan rakyat. Namun, mereka yang berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan mayoritas cenderung tidak percaya.

# PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (PPS)

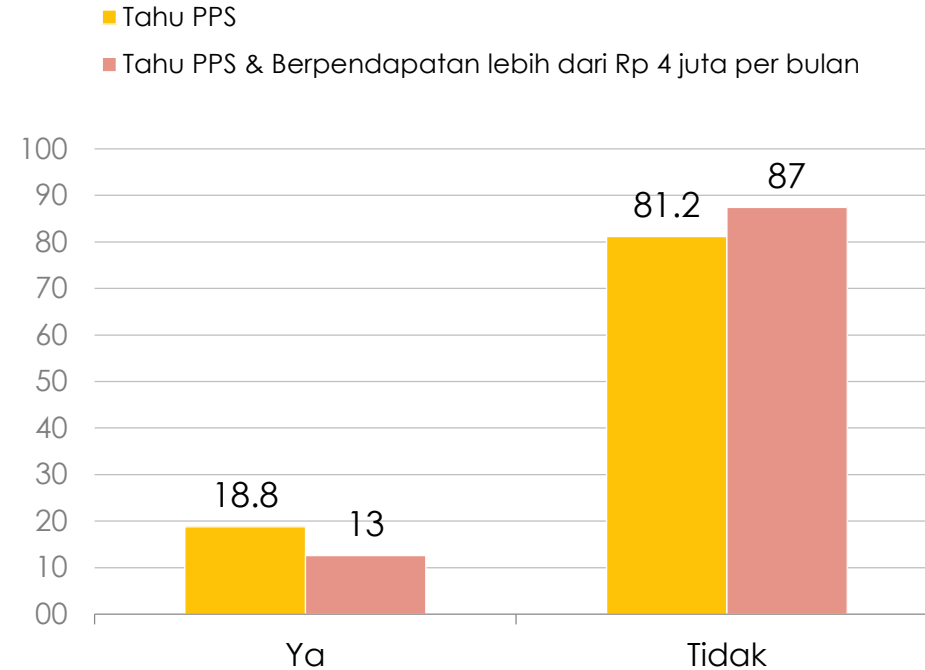
---

# PPS/TAX AMNESTY

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah Program Pengungkapan Sukarela (PPS/Tax Amnesty)?... (%)



Apakah Ibu/Bapak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS/Tax Amnesty) tersebut?... (%)  
**(Base: Tahu PPS/Tax Amnesty)**



Hanya 15.9% yang tahu, dari yang tahu hanya 18.8% yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS/Tax Amnesty) tersebut. Di kelompok yang berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan, yang tahu PPS lebih banyak, sekitar 32.9%, namun yang mengikuti PPS lebih rendah, 12.6%.

# TAHU PPS/TAX AMNESTY MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH

	BASE	Tahu	Tidak
<b>GENDER</b>			
Laki-laki	51.1	18.2	81.8
Perempuan	48.9	13.5	86.5
<b>USIA</b>			
<= 21 tahun	12.6	17.2	82.8
22 - 25 tahun	11.2	17.0	83.0
26 - 40 tahun	37.9	15.1	84.9
41 - 55 tahun	24.8	15.4	84.6
> 55 tahun	13.5	17.2	82.8
<b>ETNIS</b>			
Jawa	42.5	15.5	84.5
Sunda	14.5	9.2	90.8
Batak	3.1	18.4	81.6
Madura	3.3	16.3	83.7
Betawi	2.6	45.5	54.5
Minang	2.4	16.7	83.3
Bugis	2.5	17.8	82.2
Melayu	2.1	11.5	88.5
Lainnya	26.9	17.2	82.8
<b>AGAMA</b>			
Islam	85.8	17.0	83.0
Protestan/Katolik	10.8	11.2	88.8
Lainnya	3.4	4.5	95.5
<b>PENDIDIKAN</b>			
<= SD	35.8	9.8	90.2
SLTP	18.3	18.2	81.8
SLTA	31.2	18.5	81.5
Kuliah	14.2	23.3	76.7

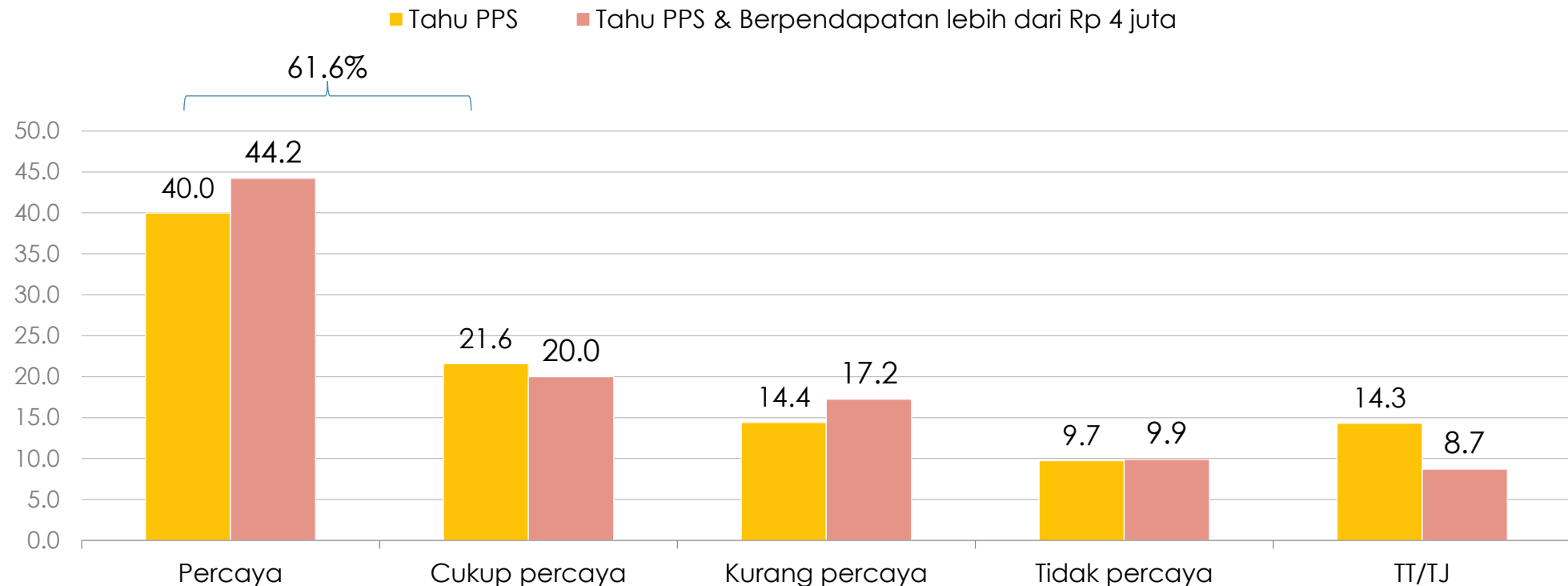
	BASE	Tahu	Tidak
<b>PEKERJAAN</b>			
Petani/peternak/nelayan	16.0	9.7	90.3
Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	34.1	13.1	86.9
Wiraswasta, pengusaha	7.6	28.0	72.0
Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	10.3	23.6	76.4
Ibu Rumah Tangga	19.7	7.7	92.3
Masih sekolah/kuliah	7.5	17.8	82.2
Lainnya	5.0	52.5	47.5
<b>PENDAPATAN</b>			
< 1 juta	23.2	10.5	89.5
1 - < 2 juta	32.7	8.8	91.2
2 - < 4 juta	25.1	17.4	82.6
=> 4 juta	19.0	32.9	67.1
<b>DESA/KOTA</b>			
Pedesaan	49.7	15.1	84.9
Perkotaan	50.3	16.8	83.2
<b>WILAYAH</b>			
SUMATERA	20.6	11.2	88.8
BANTEN	4.3	22.2	77.8
DKI	4.4	27.8	72.2
JABAR	17.2	21.9	78.1
JATENG DIY	15.9	13.0	87.0
JATIM	16.6	10.7	89.3
BALI NUSA	4.9	10.1	89.9
KALIMANTAN	5.7	9.6	90.4
SULAWESI	7.3	33.4	66.6
MALUKU PAPUA	3.1	12.0	88.0

Secara umum warga belum banyak yang tahu PPS/tax amnesty, sementara ini lebih banyak yang tahu Tax Amnesty di kelompok laki-laki, usia muda, etnis Betawi, muslim, Pendidikan dan pendapatan tinggi, kalangan wiraswasta dan pengusaha, terutama di wilayah Sulawesi.

# PPS/ TAX AMNESTY AKAN MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Apakah Ibu/Bapak percaya, cukup percaya, kurang percaya atau tidak percaya bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS/Tax Amnesty) akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak?... (%)

**(Base: Tahu PPS/Tax Amnesty)**

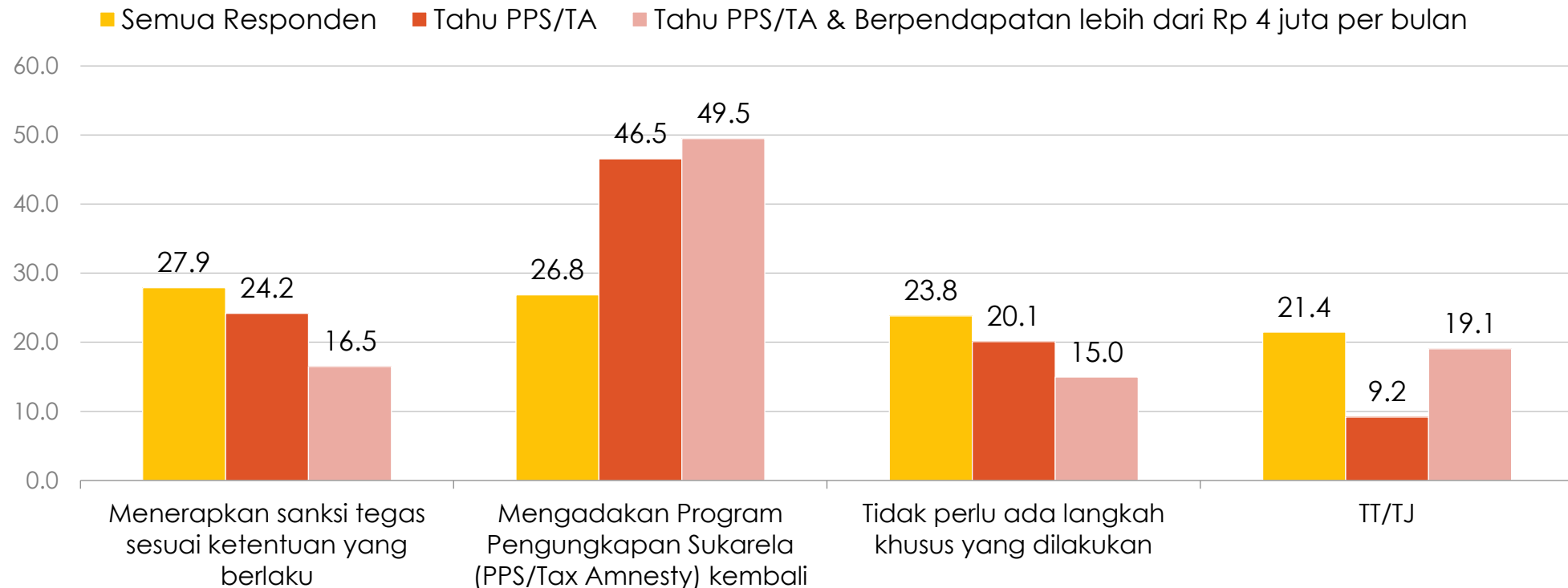


Dari yang tahu PPS, mayoritas percaya/cukup percaya bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS/Tax Amnesty) akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.



# LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MENGIKUTI PPS/TAX AMNESTY

Menurut Ibu/Bapak, langkah lanjutan apa yang harus dilakukan oleh otoritas pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS/Tax Amnesty)?... (%)



Umumnya, warga cukup mendukung penerapan sanksi tegas (27.9%) maupun program PPS kembali (26.8%). Warga yang tahu PPS maupun tahu PPS dan berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan lebih banyak yang setuju program PPS kembali.





# LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MENGIKUTI PPS/TAX AMNESTY MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH

	BASE	Menerapkan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku	Mengadakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS/Tax Amnesty) kembali	Tidak perlu ada langkah khusus yang dilakukan	TT/TJ
<b>GENDER</b>					
Laki-laki	51.1	35.2	26.4	22.3	16.2
Perempuan	48.9	20.3	27.4	25.4	27.0
<b>USIA</b>					
<= 21 tahun	12.6	30.3	34.4	17.6	17.7
22 - 25 tahun	11.2	35.5	36.3	21.7	6.5
26 - 40 tahun	37.9	17.6	23.2	32.2	27.0
41 - 55 tahun	24.8	26.3	28.1	23.0	22.6
> 55 tahun	13.5	50.9	20.1	9.6	19.4
<b>ETNIS</b>					
Jawa	42.5	32.9	21.9	22.3	22.9
Sunda	14.5	16.5	35.9	23.8	23.8
Batak	3.1	17.9	24.2	44.4	13.5
Madura	3.3	26.9	56.0	4.0	13.1
Betawi	2.6	13.9	55.7	28.1	2.3
Minang	2.4	35.4	29.8	31.1	3.6
Bugis	2.5	17.4	28.8	31.4	22.4
Melayu	2.1	24.0	13.5	23.1	39.5
Lainnya	26.9	29.3	24.3	24.6	21.8
<b>AGAMA</b>					
Islam	85.8	30.2	25.8	23.9	20.2
Protestan/Katolik	10.8	16.9	18.4	27.7	36.9
Lainnya	3.4	5.6	80.3	9.6	4.5

Lebih banyak yang menilai perlu menerapkan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku di kelompok laki-laki, usia lebih dari 55 tahun, etnis Jawa, Minang, dan Melayu, kelompok muslim, terutama pendidikan rendah, kalangan buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, pekerja tidak tetap, dan pengangguran, berpendapatan 1-< 2 juta, tinggal di pedesaan terutama di Sumatera, Jateng DIY, Bali Nusa, dan Sulawesi.

# LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MENGIKUTI PPS/TAX AMNESTY MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH

	BASE	Menerapkan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku	Mengadakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS/Tax Amnesty) kembali	Tidak perlu ada langkah khusus yang dilakukan	TT/TJ
<b>PENDIDIKAN</b>					
<= SD	35.8	30.7	18.3	20.9	30.1
SLTP	18.3	19.6	34.9	23.5	22.0
SLTA	31.2	27.3	30.0	27.7	15.0
Kuliah	14.2	33.1	31.9	23.8	11.2
Tidak Menjawab	0.5	20.3	0.0	0.0	79.7
<b>PEKERJAAN</b>					
Petani/peternak/nelayan	16.0	28.9	26.7	27.9	16.5
Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	34.1	30.6	22.3	21.6	25.5
Wiraswasta, pengusaha	7.6	35.0	36.4	13.5	15.0
Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	10.3	23.7	38.7	26.4	11.1
Ibu Rumah Tangga	19.7	17.6	21.6	33.1	27.7
Masih sekolah/kuliah	7.5	34.0	33.4	19.3	13.2
Lainnya	5.0	29.9	31.0	8.4	30.7
<b>PENDAPATAN</b>					
< 1 juta	23.2	22.0	20.3	23.4	34.3
1 - < 2 juta	32.7	34.0	26.1	19.9	20.0
2 - < 4 juta	25.1	27.2	31.6	27.7	13.5
=> 4 juta	19.0	25.5	29.9	25.9	18.8

Lebih banyak yang menilai perlu menerapkan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku di kelompok laki-laki, usia lebih dari 55 tahun, etnis Jawa, Minang, dan Melayu, kelompok muslim, terutama pendidikan rendah, kalangan buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, pekerja tidak tetap, dan pengangguran, berpendapatan 1-< 2 juta, tinggal di pedesaan terutama di Sumatera, Jateng DIY, Bali Nusa, dan Sulawesi.

# LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MENGIKUTI PPS/TAX AMNESTY MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH

	BASE	Menerapkan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku	Mengadakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS/Tax Amnesty) kembali	Tidak perlu ada langkah khusus yang dilakukan	TT/TJ
<b>DESA/KOTA</b>					
Pedesaan	49.7	33.1	25.1	20.5	21.3
Perkotaan	50.3	22.8	28.6	27.1	21.6
<b>WILAYAH</b>					
SUMATERA	20.6	29.8	22.2	26.2	21.8
BANTEN	4.3	8.2	39.4	36.4	16.0
DKI	4.4	25.8	40.9	26.3	6.9
JABAR	17.2	22.7	36.6	20.3	20.4
JATENG DIY	15.9	46.1	18.2	23.5	12.2
JATIM	16.6	24.0	31.9	18.1	26.0
BALI NUSA	4.9	35.4	8.7	10.8	45.1
KALIMANTAN	5.7	4.1	25.4	23.9	46.6
SULAWESI	7.3	34.8	26.2	31.3	7.7
MALUKU PAPUA	3.1	17.8	16.4	41.2	24.6

Lebih banyak yang menilai perlu menerapkan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku di kelompok laki-laki, usia lebih dari 55 tahun, etnis Jawa, Minang, dan Melayu, kelompok muslim, terutama pendidikan rendah, kalangan buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, pekerja tidak tetap, dan pengangguran, berpendapatan 1-< 2 juta, tinggal di pedesaan terutama di Sumatera, Jateng DIY, Bali Nusa, dan Sulawesi.

# TEMUAN

- Hanya 15.9% yang tahu, dari yang tahu hanya 18.8% yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS/Tax Amnesty) tersebut. Di kelompok yang berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan, yang tahu PPS lebih banyak, sekitar 32.9%, namun yang mengikuti PPS lebih rendah, 12.6%.
- Secara umum warga belum banyak yang tahu tax amnesty, sementara ini lebih banyak yang tahu Tax Amnesty di kelompok laki-laki, usia muda, etnis Betawi, muslim, Pendidikan dan pendapatan tinggi, kalangan wiraswasta dan pengusaha, terutama di wilayah Sulawesi.
- Dari yang tahu PPS, mayoritas percaya/cukup percaya bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS/Tax Amnesty) akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
- Umumnya, warga cukup mendukung penerapan sanksi tegas (27.9%) maupun program PPS kembali (26.8%). Warga yang tahu PPS maupun tahu PPS dan berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan lebih banyak yang setuju program PPS kembali.
- Lebih banyak yang menilai perlu menerapkan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku di kelompok laki-laki, usia lebih dari 55 tahun, etnis Jawa, Minang, dan Melayu, kelompok muslim, terutama pendidikan rendah, kalangan buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, pekerja tidak tetap, dan pengangguran, berpendapatan 1-< 2 juta, tinggal di pedesaan terutama di Sumatera, Jateng DIY, Bali Nusa, dan Sulawesi.

# KESIMPULAN DAN SARAN

---

# KESIMPULAN

- Pajak telah banyak dipahami oleh publik, khususnya warga yang berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan. Sementara secara umum, warga masih banyak yang belum paham.
- Pajak juga diketahui sebagai penerimaan negara yang terbesar dibandingkan penerimaan lain. Namun demikian, warga umumnya berpendapat bahwa pendapatan negara dinaikkan dengan mencari sumber lain, termasuk hutang agar tidak membebani rakyat. Persepsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar publik masih menganggap bahwa pajak merupakan beban rakyat.
- Kepercayaan publik terhadap penggunaan uang pajak untuk rakyat masih perlu ditingkatkan. Publik pada umumnya cenderung percaya tentang prinsip gotong royong dari pajak, juga di kalangan yang berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan. Akan tetapi, terutama mereka yang berpendapatan lebih Rp 4 juta per bulan cenderung tidak percaya bahwa uang pajak telah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan kepentingan rakyat.
- Kepercayaan publik tersebut sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi publik dalam program-program perpajakan.

# KESIMPULAN

- Saat ini cukup banyak warga yang taat pajak dengan memiliki NPWP, terutama mereka yang berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan. Kepemilikan NPWP warga, khususnya yang juga berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan cenderung lebih taat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) dan membayar Pajak Penghasilan (PPH).
- Pemilik NPWP juga menilai bahwa pembayaran pajak dapat dilakukan dengan mudah. Secara umum, penilaian ini dapat berhubungan dengan evaluasi positif terhadap pelayanan petugas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan NPWP penting untuk ketaatan warga dalam membayar pajak dan kemudahan pembayaran pajak.
- Pentingnya kepemilikan NPWP ini kemudian coba diperluas dalam program NIK sebagai NPWP. Akan tetapi, saat ini mayoritas pemilik NPWP belum mengetahui program tersebut, meskipun di kalangan warga dengan pendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan lebih banyak yang tahu dibandingkan penghasilan yang lebih rendah.

# KESIMPULAN

- Meski secara teknis, warga menilai bahwa pembayaran pajak itu mudah, namun cukup banyak yang menilai sulit untuk membayar pajak. Kendala utama adalah karena kondisi keuangan yang kurang baik. Hal ini diungkapkan warga secara umum, termasuk mereka dengan pendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah, bahwa ketidaktaatan dapat disebabkan oleh kesulitan ekonomi yang saat ini dinilai semakin buruk.
- Sanksi bagi warga yang tidak membayar pajak telah diketahui terutama oleh mereka dengan pendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan. Pengetahuan akan sanksi ini biasanya juga berhubungan dengan ketaatan menunaikan kewajiban membayar pajak.



# KESIMPULAN

- Dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty, warga belum banyak yang tahu program ini meski di kalangan berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan lebih banyak yang tahu. Akan tetapi, di kalangan yang tahu, mayoritas tidak mengikuti program PPS ini. Hal ini patut menjadi perhatian, karena mayoritas warga umumnya percaya bahwa PPS meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- Masih terkait dengan PPS, umumnya warga cenderung setuju jika pemerintah mengadakan PPS kembali terhadap wajib pajak yang tidak mengikuti PPS. Hal ini diungkapkan terutama oleh yang tahu PPS dan tahu serta berpendapatan lebih dari Rp 4 juta per bulan.
- Temuan survei menggarisbawahi pentingnya pengetahuan publik akan program pemerintah dalam perpajakan, khususnya di kalangan wajib pajak. Sejauh ini, wajib pajak memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan publik pada umumnya. Selain pengetahuan, persepsi publik akan penggunaan uang pajak yang mereka bayarkan, kemudahan pembayaran pajak, kinerja petugas pajak, serta sanksi juga penting demi meningkatkan keterlibatan dan partisipasi publik. Namun demikian, di sisi lain, kondisi ekonomi yang masih belum publik menjadi kendala untuk berpartisipasi. Artinya, kesuksesan program perpajakan merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi secara umum.

TERIMA KASIH



Jl. Cisadane No. 8, Menteng – Jakarta Pusat

Telp: (021) 31927996/98, Fax: (021) 3143867

Website: [www.indikator.co.id](http://www.indikator.co.id)